



ASIA PACIFIC FORUM
ADVANCING HUMAN RIGHTS IN OUR REGION

Panduan Pelaksanaan untuk

Rencana Aksi Regional Asia Pacific
Forum (APF) tentang Pembela Hak
Asasi Manusia (RAR)



2021 - 2025

 International Service
for Human Rights

Daftar Isi

BAB 1: Pengantar dan cara menggunakan panduan ini	5
A. Tentang panduan ini	6
B. Panduan ini untuk siapa?	6
C. Cara menggunakan panduan ini	6
D. Rencana Aksi Regional APF tentang Pembela Hak Asasi Manusia (RAR)	6
BAB 2: Panduan Pelaksanaan untuk Rencana Aksi Regional	8
A. Elemen yang bersinggungan: Konsultasi, Keamanan, dan Perlindungan Kolektif	9
i. LNHAM sebagai PHAM	9
ii. Konsultasi	9
iii. Keamanan	10
iv. Perlindungan kolektif	10
AKSI NASIONAL 1: Memperjuangkan perlindungan hukum nasional	11
A. Mendukung program pemerintah tentang hak-hak PHAM	12
B. Pengakuan hukum atas pembela HAM	12
C. Analisis tentang kerangka kerja hukum nasional	12
D. Undang-undang yang mengekang hak-hak pembela HAM	13
E. Undang-undang untuk perlindungan pembela HAM	14
AKSI NASIONAL 2: Memajukan kesetaraan gender dan mengarusutamakan pengakuan terhadap Perempuan Pembela HAM	16
A. Pengakuan yang tegas terhadap PPHAM dalam kegiatan perlindungan dan promosi	17
B. Pemilahan data menurut gender	18
C. Perlindungan terhadap PHAM transgender dan non-biner	18
AKSI NASIONAL 3: Meningkatkan kesadaran tentang hak-hak Pembela HAM	20
A. Mengarusutamakan hak-hak PHAM dalam kegiatan promosi LNHAM	21
i. Mengarusutamakan hak-hak PHAM dalam LNHAM Anda	21
ii. Mengarusutamakan peran PHAM dalam kampanye dan komunikasi tentang berbagai masalah tematik	21
B. Kontranarasi terhadap PHAM	22
i. Narasi positif tentang PHAM	22

C. Mengembangkan kampanye spesifik tentang hak-hak PHAM	23
i. Peningkatan kesadaran tentang kebutuhan dan situasi PHAM	23
ii. Peningkatan kesadaran tentang pelanggaran terhadap PHAM	24
iii. Peningkatan kesadaran tentang hak-hak PHAM	24
iv. Kegiatan yang secara spesifik difokuskan pada PPHAM	24
D. Melakukan kampanye peningkatan kesadaran di antara PHAM	25
E. Membuat sumber daya penting yang tersedia dalam bahasa lokal	26
AKSI NASIONAL 4: Mengembangkan ‘sistem peringatan dini’	27
A. Pentingnya SPD	28
B. Fungsi SPD	28
i. Merespons pemberitahuan	29
C. Membentuk staf narahubung PHAM di LNHAM	30
D. Mengembangkan dan menyediakan tim cepat tanggap	31
E. Menyiapkan saluran siaga nasional dan saluran komunikasi lainnya untuk PHAM yang terancam bahaya	32
F. Program relokasi dan jeda istirahat nasional	32
G. Mekanisme perlindungan khusus	32
AKSI NASIONAL 5: Memantau pelanggaran terhadap Pembela Hak Asasi Manusia	34
A. Peraturan penting tentang pengumpulan data	35
i. Menyertakan PHAM sebagai prioritas khusus dalam Rencana Strategis	35
ii. Pengelolaan informasi yang aman dari PHAM	35
iii. Pemilahan data	36
B. Mengidentifikasi PHAM dalam sistem penanganan aduan	37
C. Memantau implementasi pemerintah terhadap Deklarasi PHAM tahun 1998	37
D. Mengumpulkan data yang dipilih tentang pelanggaran dari jaringan PHAM dan sumber komunitas lainnya	38
i. Data yang akan dikumpulkan	38
ii. Pengumpulan data	40
iii. Menganalisis data	41

AKSI NASIONAL 6: Melaporkan pelanggaran terhadap Pembela Hak Asasi Manusia	42
A. Melakukan penyelidikan nasional atau sesuai konteks terkait pelanggaran terhadap PHAM	43
B. Menyusun laporan khusus tentang situasi pelanggaran terhadap pembela HAM	43
i. Pelaporan nasional	43
ii. Melaporkan sebagai bentuk partisipasi	44
C. Menyertakan bab PHAM dalam laporan tahunan LNHAM	44

AKSI NASIONAL 7: Terlibat dalam sistem HAM internasional	45
A. Melaporkan pelanggaran kepada badan HAM internasional	46
B. Memantau implementasi rekomendasi dari badan internasional	46
i. Cara menindaklanjuti rekomendasi	46
C. Prosedur Khusus	48
i. Elemen utama	48
ii. Hasil dari Prosedur Khusus	49
D. Pelapor Khusus tentang situasi pembela HAM	51
E. Memperkuat kapasitas anggota dalam partisipasi	52

AKSI NASIONAL 8: Memperkuat jaringan Pembela HAM nasional	53
A. Mendukung pembentukan, pengadaan, penyuluhan, dan kemitraan jaringan PHAM	54

LAMPIRAN I	55
-------------------	-----------



BAB 1:

Pengantar dan cara menggunakan panduan ini

A. Tentang panduan ini

Materi ini menyediakan panduan langkah demi langkah untuk Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) Anda dalam menerapkan rencana Aksi Regional APF tentang Pembela HAM (RAR).

Materi ini, serta kursus daring (online) yang menyertainya dalam Komunitas APF, bertujuan untuk mendukung LNHAM Anda dalam menerapkan Rencana Aksi Regional di tingkat nasional.

B. Panduan ini untuk siapa?

Panduan ini ditujukan untuk pimpinan dan anggota LNHAM, termasuk Ombudsman, Komisioner, Pejabat Eksekutif Senior (SEO), manajer senior, serta staf yang akan terlibat dalam upaya memajukan dan melindungi hak-hak pembela hak asasi manusia (PHAM).

C. Cara menggunakan panduan ini

Anda dapat menggunakan panduan ini sebagai pembelajaran individu kapan pun Anda inginkan, atau bersama rekan saat memulai proses untuk menyertakan fokus tentang PHAM ke dalam pekerjaan Anda. Kursus daring yang menyertainya juga tersedia untuk staf LNHAM untuk diikuti di Komunitas APF.

D. Rencana Aksi Regional APF tentang Pembela Hak Asasi Manusia (RAR)

Rencana Aksi Regional tentang Pembela Hak Asasi Manusia (RAR) menetapkan agenda aksi atas nama APF dan anggotanya untuk memperjuangkan hak-hak PHAM di tingkat wilayah. RAR juga mewujudkan komitmen utama APF dan anggotanya berdasarkan *Deklarasi Marrakesh 2018*,¹ yang membentuk kerangka kerja aksi global oleh LNHAM untuk mendukung hak-hak PHAM.

Sejak awal terjadinya pandemi COVID-19, PHAM telah menghadapi peningkatan ancaman terhadap keamanan, kesejahteraan, dan kemampuan mereka untuk secara terbuka memprotes pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Pengerdilan ruang kebebasan sipil di seluruh wilayah dan dampaknya pada kemampuan PHAM untuk bekerja dengan aman, menuntut respons yang kolektif dan sistematis dari segi advokasi, kemitraan strategis, dan pengembangan program dari LNHAM dan mitra Anda.

RAR menyoroti peningkatan risiko yang dihadapi Perempuan Pembela HAM (PPHAM) dan mencakup keterlibatan untuk memfokuskan dukungan untuk pembela HAM di bidang penting yang utama, seperti bisnis dan HAM; hak disabilitas; hak terkait Orientasi Seksual, Identitas dan Ekspresi Gender, serta Karakteristik Seksual (SOGIESC); dan hak atas lingkungan yang aman dan sehat. Yang terpenting, RAR mengakui peran penting LNHAM dalam melindungi PHAM dan sebagai PHAM itu sendiri.

RAR memuat serangkaian aksi regional dan nasional yang akan diterapkan oleh APF dan LNHAM anggotanya paling lambat pada tahun 2025 untuk meningkatkan respek terhadap hak-hak pembela HAM di Asia Pasifik.

1 https://ganhri.org/wp-content/uploads/2019/11/Marrakech-Declaration_ENG_-12102018-FINAL.pdf

Aksi Regional mencakup:

1. Mendukung pengambilan kebijakan regional tentang PHAM;
2. Terlibat dengan aktor masyarakat sipil regional dan mitra internasional;
3. Memfasilitasi kolaborasi antara LNHAM;
4. Memfasilitasi relokasi dan jeda istirahat untuk PHAM;
5. Mendukung pembentukan LNHAM;
6. Mengembangkan data regional tentang PHAM; dan
7. Memperkuat kapasitas LNHAM.

Aksi nasional, yang akan diterapkan oleh anggota APF dengan dukungan dari APF, diantaranya:

1. Memperjuangkan perlindungan hukum nasional;
2. Memajukan kesetaraan gender dan mengarusutamakan pengakuan terhadap PPHAM;
3. Meningkatkan kesadaran tentang hak-hak PHAM;
4. Mengembangkan 'sistem peringatan dini';
5. Memantau pelanggaran terhadap PHAM;
6. Melaporkan pelanggaran terhadap PHAM;
7. Terlibat dengan sistem HAM internasional; dan
8. Memperkuat jaringan PHAM nasional.

Baik aksi nasional maupun regional akan dilengkapi dengan kerangka kerja pemantauan dan evaluasi terperinci yang akan melacak pelaksanaan selama berjalannya RAR serta akan mencakup pelaporan berkala dan publik tentang kemajuannya.



BAB 2:

Panduan Pelaksanaan untuk Rencana Aksi Regional

Panduan ini dimaksudkan untuk menyediakan panduan bagi LNHAM dalam menerapkan RAR. Panduan ini dibuat agar bersifat sepraktis mungkin, untuk membantu LNHAM Anda dalam mengambil langkah untuk melaksanakan aksi dalam RAR.

Panduan ini akan difokuskan pada aksi nasional serta mencakup delapan modul yang dipandu oleh tiap aksi nasional yang tertera di atas.

A. Elemen yang bersinggungan: Konsultasi, Keamanan, dan Perlindungan Kolektif

i. LNHAM sebagai PHAM

LNHAM sendiri dapat, dan seharusnya dianggap sebagai PHAM. LNHAM yang independen memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan perwujudan HAM dan kebebasan fundamental di tingkat nasional, yang sejalan dengan definisi PHAM.²

Mantan Special Rapporteur (Pelapor Khusus) PBB tentang situasi PHAM (UNSR tentang PHAM), Margaret Sekaggya menyebutkan dalam laporan tahunannya bahwa: “[...] *lembaga nasional yang beroperasi dengan mematuhi Prinsip-Prinsip Paris serta anggota dan stafnya, dapat dianggap sebagai pembela HAM. Dia tahu bahwa mereka menghadapi tantangan penting dan rentan mengalami serangan, ancaman, intimidasi, dan pelecehan sehubungan dengan aktivitas HAM mereka*”.³

Pengklasifikasian LNHAM sebagai PHAM berarti mengakui pekerjaan penting yang mereka lakukan, hak-hak tertentu yang berhak mereka dapatkan, serta bahaya yang mereka hadapi karena pekerjaan mereka. Hal ini menyoroti mengapa LNHAM harus mempertimbangkan penerapan standar tentang hak-hak PHAM tidak hanya secara eksternal (untuk orang yang mencari bantuan), tetapi juga secara internal (untuk staf LNHAM).

Seperti yang dialami semua PHAM, hak yang diperoleh dan risiko yang dihadapi akan bervariasi. Misalnya, anggota LNHAM yang bekerja di lapangan bersama korban kemungkinan akan lebih rentan mengalami tindakan pembalasan daripada staf lainnya. Mengingat keterkaitan antara LNHAM dan pemerintah, pemerintah yang konfrontatif mungkin berupaya membatasi LNHAM dari aspek finansial atau legislatif. Dengan cara ini, pengekan terhadap mandat mereka, serangan terhadap otonomi dan kemandirian mereka, serta pembatasan terhadap kompetensi mereka merupakan sejumlah risiko utama yang dihadapi oleh LNHAM.⁴

Oleh karena itu, program pelatihan dan sarana perlindungan harus mempertimbangkan kekhasan LNHAM sebagai PHAM dan disesuaikan untuk merespons tantangan ini secara memadai. Seperti yang disampaikan Pelapor Khusus tentang PHAM: “...*anggota dan staf lembaga nasional harus menyadari risiko bahwa pekerjaan mereka mengandung konsekuensi sehingga harus dibekali dan dilatih dengan semestinya untuk menghadapi risiko tersebut. Selain itu, ketentuan dan sumber daya khusus harus disediakan untuk memberi perlindungan yang memadai kepada mereka jika dibutuhkan*.”⁵

ii. Konsultasi

Semua aksi yang dilakukan dalam penerapan Panduan ini akan harus dikembangkan dan membutuhkan adaptasi untuk konteks nasional yang relevan. Penting bagi Anda untuk bertindak totalitas dengan PHAM, komunitas mereka, serta organisasi di tingkat bawah karena semua aksi di tingkat nasional dan internasional perlu dimulai secara menyeluruh.

Semua aksi nasional yang tercantum dalam panduan ini harus dilakukan melalui konsultasi dengan PHAM. Semua aksi untuk perlindungan PHAM harus dipimpin oleh PHAM. Konsultasi dengan PHAM harus dilakukan secara inklusif dan harus mengikutsertakan PHAM dalam semua keragaman mereka (PPHAM, PHAM hak-hak SOGIESC, PHAM pribumi, dsb.) serta PHAM yang menangani berbagai area dan isu (hak-hak imigran, hak lingkungan, hak-hak perempuan). Dalam setiap konteks nasional, terdapat kelompok PHAM yang paling berisiko sehingga mereka penting untuk dilibatkan dan diajak berkonsultasi terkait upaya untuk melindungi mereka sehingga aksi tersebut responsif dan efektif. Anda harus menyertakan

2 Deklarasi PBB tentang PHAM, Pasal 1, <https://www.ohchr.org/en/issues/srhrdefenders/pages/declaration.aspx>

3 <https://undocs.org/en/A/HRC/22/47> ayat 34

4 <https://undocs.org/en/A/HRC/22/47> ayat 27, 40, 59

5 <https://undocs.org/en/A/HRC/22/47> ayat 83

praktik konsultasi dan pendekatan yang berbasis HAM serta memastikan bahwa hal ini tidak dengan sengaja mendiskriminasi atau mengasingkan sebagian PHAM. Pendekatan interseksional juga diperlukan, mengingat terjadinya pelanggaran multidimensi terhadap PHAM, terutama perempuan, masyarakat adat, dan masyarakat terpinggirkan.

iii. Keamanan

Semua aksi yang dilakukan dalam pelaksanaan Panduan ini harus memprioritaskan keamanan PHAM atau kelompok PHAM tertentu. Kami mengusulkan agar dalam melaksanakan Panduan ini, pengguna mengadopsi pendekatan ‘jangan merugikan’ dan memprioritaskan keamanan korban sebisa mungkin.

Ini mencakup memastikan kerahasiaan dan keamanan komunikasi kapan pun Anda menerima informasi sensitif dari PHAM serta informasi tentang ancaman yang dihadapi oleh PHAM. Bukan hal yang aneh bagi PHAM jika diawasi oleh lembaga pemerintah dan aktor non-Negara sehingga komunikasi yang aman harus dipertahankan.⁶ Materi edukasi (seperti “panduan security in-a-box”)⁷ harus tersedia (dan dalam bahasa terkait) sehingga baik staf Anda maupun PHAM eksternal mengetahui, mengadopsi, dan menerapkan praktik keamanan digital yang tepat.

iv. Perlindungan kolektif

Perlindungan PHAM secara tradisional berfokus pada aspek keamanan individu; yaitu cara menjamin keamanan dan integritas PHAM tertentu (mis. dengan pengawal pribadi/bodyguard atau relokasi). Meski demikian, pendekatan individu terhadap perlindungan memiliki keterbatasan, misalnya menimbulkan konflik dengan organisasi dan masyarakat karena memprioritaskan sejumlah pembela HAM dibanding pembela HAM lainnya.⁸

Perlindungan kolektif bertujuan untuk memperkuat gerakan sosial dan mewujudkan lingkungan yang mendukung PHAM untuk membela HAM. Ini sangat terkait erat dengan kekhususan konteks lokal kelompok atau masyarakat serta dengan kapasitas internal mereka untuk bertahan. Keamanan pembela HAM pada dasarnya sering terkait dengan keamanan masyarakat dan wilayah mereka serta hanya dapat sepenuhnya dicapai dalam konteks pendekatan holistik. Pendekatan ini mencakup pendalaman demokrasi, perjuangan menentang impunitas, pengurangan kesenjangan ekonomi, serta pencarian keadilan sosial dan lingkungan.

Perlindungan kolektif juga menyiratkan pembangunan kekuatan kolektif dengan menanamkan strategi perlindungan di wilayah, praktik budaya, pengetahuan leluhur, dan kehidupan komunitas pembela HAM, dengan mendukung pembentukan dan pengaktifan jaringan perlindungan dan ruang yang aman.

Pendekatan Anda terhadap perlindungan harus mempertimbangkan keterkaitan antar semua aspek yang berbeda dalam kehidupan PHAM yang mungkin terdampak karena pekerjaan mereka (fisik, emosional, finansial, interpersonal, profesional, dsb.) serta mengambil tindakan untuk menghadapinya secara keseluruhan.⁹ Materi tentang keamanan holistik ini¹⁰ oleh Center for Victims of Torture, Tactical Technology Collective, dan Front Line Defenders menyediakan panduan yang berguna.

6 <https://undocs.org/A/HRC/31/55> ayat 59

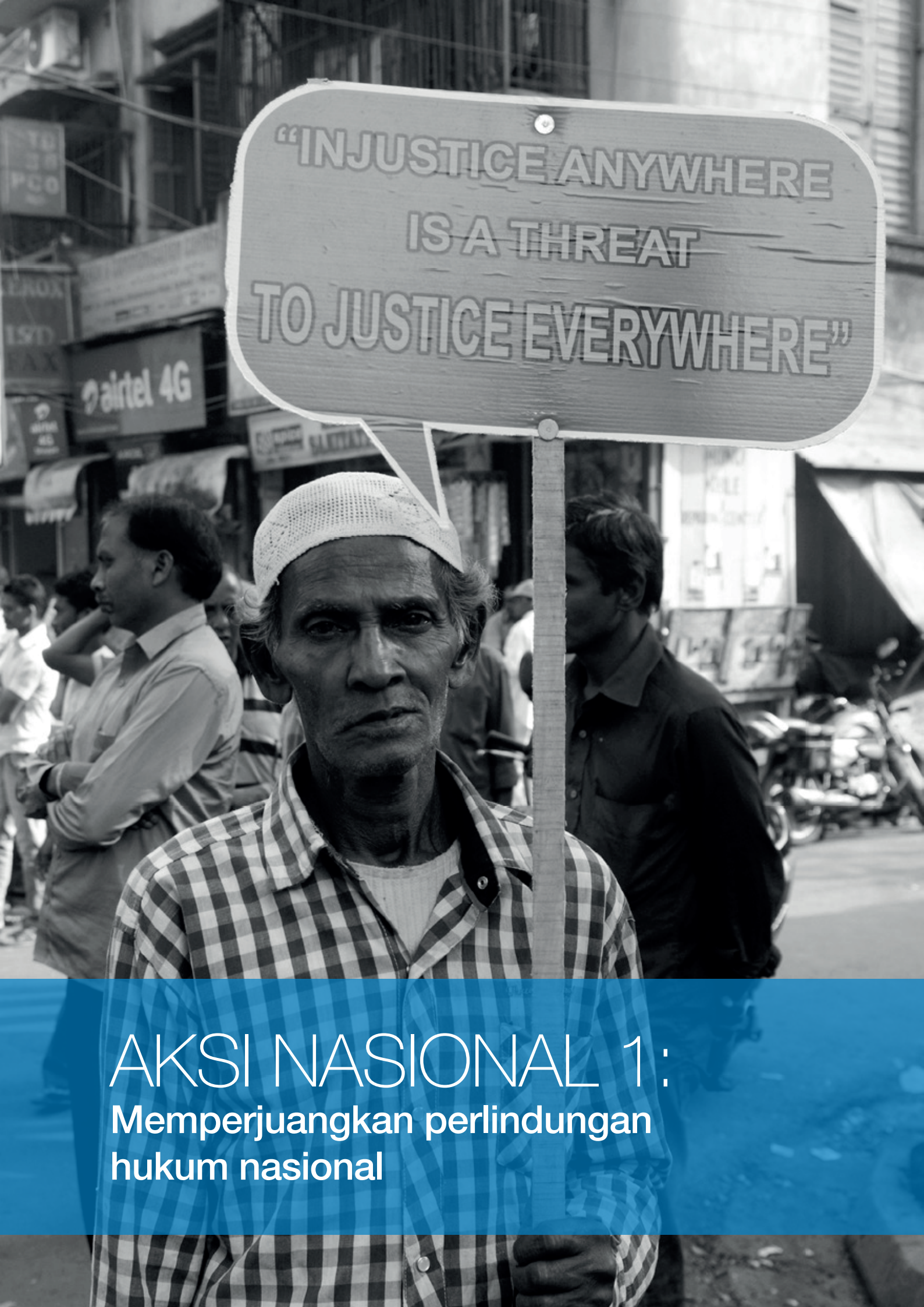
7 <https://securityinabox.org/en/>

8 Lolita Chavez/Marusia Lopez (2021): <https://www.jass-fghr.org/collective-protection-to-defend-territory-defense-of-territory-to-protect-life?source=share-jass>

See also: <https://justassociates.org/en/resources/mch-6-rethinking-protection-power-movements>

9 https://holistic-security.tacticaltech.org/media/sections/chapterpdfs/original/HS_Complete_HiRes.pdf

10 https://holistic-security.tacticaltech.org/media/sections/chapterpdfs/original/HS_Complete_HiRes.pdf



"INJUSTICE ANYWHERE
IS A THREAT
TO JUSTICE EVERYWHERE"

AKSI NASIONAL 1:

Memperjuangkan perlindungan
hukum nasional

A. Mendukung program pemerintah tentang hak-hak PHAM

Berbagai program pemerintah sudah ada untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak PHAM. Sejak awal, Anda harus mendukung semua program ini sebaik mungkin selama PHAM nasional mengonfirmasi efektivitasnya, dan secara ideal, terlibat dalam pengembangan dan implementasinya.

Anda juga dapat berperan penting dalam memperjuangkannya, dan mendukung pemerintah untuk meningkatkan kualitas program yang ada, serta mengembangkan program baru, seperti biasa, diinformasikan dan dipandu oleh PHAM nasional.

B. Pengakuan hukum atas pembela HAM

Pengakuan hukum dan perlindungan terhadap PHAM bersifat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat bekerja di lingkungan yang aman dan mendukung serta bebas dari serangan, tindakan pembalasan, dan pengekangan yang tidak wajar.¹¹ Pengakuan hukum dan perlindungan terhadap pembela HAM juga berkontribusi terhadap tujuan yang lebih luas yaitu menjunjung tinggi HAM, serta memajukan demokrasi, pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, dan respek terhadap konsep negara hukum (rule of law).

Baru-baru ini, terdapat peningkatan tuntutan untuk memperkuat perlindungan legislatif nasional untuk PHAM. PHAM dan organisasi yang berbasis masyarakat di banyak yurisdiksi telah mengupayakan strategi dan kampanye untuk memperkuat kerangka kerja legislatif di tempat mereka beroperasi untuk melindungi hak-hak mereka dengan lebih baik.

C. Analisis tentang kerangka kerja hukum nasional

Dewan HAM PBB telah mengakui “[...] nilai-nilai dari lembaga HAM nasional, yang didirikan dan beroperasi sesuai dengan Prinsip-Prinsip Paris, dalam pemantauan berkelanjutan terhadap undang-undang yang ada serta secara konsisten menginformasikan Negara tentang dampaknya terhadap aktivitas pembela HAM, termasuk dengan memberikan rekomendasi yang relevan dan konkret”.¹²

Untuk memperkuat pengakuan hukum dan perlindungan terhadap PHAM, penting untuk pertama-tama memeriksa kerangka kerja hukum yang ada untuk melindungi PHAM di negara tertentu. Untuk hal ini, perlu dilakukan analisis terhadap undang-undang dan kebijakan nasional serta cara keduanya dalam melindungi dan membahas hak-hak PHAM. Ini akan membantu mengidentifikasi kekuatan dari kerangka kerja hukum, serta kesenjangan di mana penguatan dibutuhkan.

Analisis apa terhadap kerangka kerja hukum harus melibatkan studi kepustakaan tentang undang-undang, kebijakan, dan peraturan, serta fokus pada implementasi hukum tersebut dan konsultasi dengan PHAM di dalam negeri. Sebagai contoh, Anda harus dapat menentukan sejauh mana kerangka kerja hukum nasional melindungi hak-hak utama, misalnya hak atas kebebasan berkumpul atau berekspresi. Meski demikian, per juga mempelajari undang-undang lainnya serta dampaknya secara tidak langsung terhadap PHAM, misalnya undang-undang yang membatasi hak atas kebebasan berserikat untuk penduduk tertentu (seperti komunitas LGBTIQ atau jika diskriminasi berbasis kasta berinteraksi dengan hak-hak dasar). Seperti ditegaskan di atas, semua konsultasi dengan PHAM harus melibatkan PHAM dalam semua keberagamannya serta di seluruh area masalah.

¹¹ *December 2013 Report of the UN Special Rapporteur on the situation of HRDs A/HRC/25/55*; Perlindungan terhadap PHAM, termasuk melalui kerangka kerja hukum yang kondusif, bersifat penting bagi perusahaan dan investor: https://www.iccr.org/sites/default/files/resources_attachments/investor_alliance_for_human_rights_hrds_sign-on_final04.23.18.pdf.

¹² <https://www.refworld.org/docid/53bfa8564.html> ayat 16

D. Undang-undang yang mengekang hak-hak pembela HAM

Masih terdapat kesenjangan besar antara komitmen yang dibuat oleh Negara-Negara melalui Deklarasi PBB tentang PHAM serta instrumen internasional lainnya tentang perlindungan terhadap PHAM, serta implementasinya di lapangan. Terdapat juga peningkatan kekhawatiran dalam koridor hukum yang membatasi pelaksanaan hak dan kebebasan dasar, hak-hak yang penting bagi pembela HAM untuk melaksanakan pekerjaannya yang sah. Misalnya, undang-undang anti-terorisme di Filipina¹³ Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong,¹⁴ Undang-Undang Perlindungan dari Kebohongan dan Manipulasi Daring, Undang-Undang Ketertiban Umum, dan Undang-Undang Administrasi Peradilan di Singapura,¹⁵ dan Rancangan Undang-Undang Ketertiban Umum di Kamboja.¹⁶

Seperti yang dinyatakan dalam Prinsip-Prinsip Paris, LNHAM harus memiliki kompetensi untuk menyampaikan pendapatnya kepada Parlemen dan badan yang berwenang lainnya, tentang ketentuan legislatif atau administratif yang berdampak terhadap HAM, merekomendasikan pengadopsian atau amendemen terhadap undang-undang nasional guna mematuhi instrumen HAM internasional dan secara bebas menjawab opini publik terkait masalah HAM.¹⁷

Anda memiliki peran penting dalam memantau rancangan undang-undang yang mungkin memiliki konsekuensi (yang diinginkan atau tidak diinginkan) dari mengekang hak-hak PHAM. Penting kiranya untuk mempertimbangkan bahwa undang-undang ini secara eksplisit jarang menyebutkan niat untuk mengekang PHAM. Undang-undang seperti ini biasanya disajikan dengan lingkup yang luas dan tidak jelas seperti “menjaga ketertiban umum”, “memberantas terorisme”, atau “melindungi keamanan nasional”.

Pelibatan dalam undang-undang yang memengaruhi hak-hak PHAM harus dilakukan melalui konsultasi dengan PHAM serta pemangku kepentingan lainnya yang dapat memberikan wawasan tentang kemungkinan pengaruh dari undang-undang tersebut. Konsultasi tersebut juga akan memberikan panduan terkait undang-undang yang menuntut perhatian serius dari LNHAM Anda dalam mendesak pembatalan atau amendemen undang-undang, kebijakan, atau peraturan, atau ketentuan spesifik dalam instrumen tersebut.

Begitu undang-undang yang berbahaya telah diidentifikasi, strategi tindak lanjut harus dikembangkan. Strategi LNHAM dalam mengamendemen atau membatalkan undang-undang yang mengekang dapat mencakup pernyataan publik yang mengungkapkan kekhawatiran terhadap instrumen, litigasi demi kepentingan umum, penyelidikan nasional, advokasi langsung dengan perwakilan pemerintah dan badan pemerintah atau anggota parlemen, serta kampanye yang fokus pada masyarakat. Anda dapat mengembangkan advokasi dan saran teknis yang paling sesuai dengan konteks nasional tertentu serta dikembangkan dan diterapkan melalui konsultasi dengan PHAM.

Kegiatan edukasi dan promosi tentang topik HAM juga dapat berfungsi sebagai bagian dari kampanye untuk menolak undang-undang yang mengekang. Forum atau webinar di mana anggota LNHAM Anda mendiskusikan implikasi hukum dari undang-undang tersebut dapat menjadi cara yang berguna untuk memberi informasi, menyampaikan info terbaru, dan berdiskusi dengan masyarakat sipil. Kegiatan ini dapat diadakan, disponsori, atau didukung oleh LNHAM Anda. Anda juga dapat meminta dukungan atau pernyataan dari organisasi internasional, yang mungkin memiliki jangkauan daring lebih jauh atau di lingkup internasional.

Contoh yang berguna dapat dilihat di situs ‘Laporan dan penelusuran komunikasi’ OHCHR, tempat disimpannya komunikasi oleh pemegang mandat Special Procedure (Prosedur Khusus) PBB untuk Negara-Negara, beberapa di antaranya terkait dengan undang-undang, kebijakan, dan peraturan di tingkat nasional, serta standar HAM internasional yang terkait.¹⁸ Anda juga dapat menghubungi pemegang mandat Prosedur Khusus terkait untuk meminta saran.

13 <https://ishr.ch/latest-updates/philippines-anti-terrorism-law-further-threatens-safety-human-rights-defenders/>

14 <https://ishr.ch/latest-updates/hong-kong-un-committee-raises-questions-about-national-security-law-police-violence-and-free/>

15 <https://www.hrw.org/news/2021/09/30/singapore-must-expand-civic-space-and-end-undue-restrictions-fundamental-freedoms#>

16 <https://www.amnesty.org/en/documents/asa23/2873/2020/en/>

17 Prinsip-Prinsip Paris A.3; https://apf-prod.s3.amazonaws.com/media/resource_file/SCA_General_Observations_February_2018.pdf?AWSAccessKeyId=AKIA57J6V557ISASX34R&Signature=B5aMLN0sFIJyYXBujtR%2Fh21ag0%3D&Expires=1635448674 G.O. 1.2 Mandat HAM

18 spcommreports.ohchr.org/TmSearch/Mandates?m=30; ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/comments-legislation-policy.aspx

Studi Kasus:

Pada tahun 2020, Komisi HAM Filipina merilis pernyataan publik tentang undang-undang anti-teroris yang diusulkan.¹⁹ Pernyataan ini dengan jelas menguraikan bahwa ketentuannya mengkhawatirkan bagi Komisi jika dilihat dari sudut pandang HAM.

Saat reformasi yang mengekang pada Undang-Undang Nasional tentang LSM diumumkan, LNHAM Guatemala mengajukan gugatan hukum kepada mahkamah konstitusi negara tersebut, yang meminta agar UU tersebut dinyatakan tidak sesuai dengan konstitusi karena dampaknya yang merugikan pada ruang kebebasan masyarakat sipil.²⁰

E. Undang-undang untuk perlindungan pembela HAM

Negara memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan agar PHAM dapat melakukan pekerjaannya secara leluasa di lingkungan yang aman dan mendukung. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai pakar dan mekanisme PBB, seperti Special Procedure (Prosedur Khusus), Treaty Body (Badan Traktat), Dewan HAM serta Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, bersama dengan badan pakar HAM regional, telah mendesak Negara-Negara untuk mengimplementasikan undang-undang yang secara eksplisit menjamin penegakan hak dalam Pernyataan PBB tentang PHAM.

Mekanisme perlindungan pembela HAM pertama kali dibuat di Kolombia dan Brasil pada tahun 90-an. Baru-baru ini, Pantai Gading, Burkina Faso, dan Mali di Afrika Barat, serta Honduras, Meksiko, Peru, dan Mongolia telah mengadopsi undang-undang perlindungan PHAM, serta rancangan undang-undang sudah diajukan ke Parlemen di Filipina.

Pada tahun 2016, ISHR memfasilitasi pengembangan 'Model Hukum tentang Pengakuan dan Perlindungan bagi PHAM'.²¹ Model Hukum ini direkomendasikan oleh 28 pakar tingkat tinggi dan dikembangkan selama tiga tahun berdasarkan informasi dari lebih 500 PHAM di lebih dari 110 Negara dari seluruh wilayah, sub-wilayah, dan tradisi hukum.

Model Hukum ini memenuhi tiga sasaran utama:

- Untuk membantu dan menyediakan panduan teknis bagi Negara-negara dalam mengembangkan undang-undang, kebijakan, dan lembaga di tingkat nasional guna mendukung pekerjaan pembela HAM serta melindungi mereka dari tindakan pembalasan dan serangan;
- Untuk menyediakan sarana bagi pembela HAM yang memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hukum untuk pekerjaan penting mereka; dan
- Untuk menyediakan sarana kepada Negara dan pembela HAM dalam mengukur dan menilai jangkauan dan efektivitas undang-undang dan kebijakan yang sudah ada.

Model Hukum ini menyediakan materi penting untuk LNHAM yang bekerja sama dengan PHAM serta masyarakat sipil untuk menuju pengembangan undang-undang perlindungan PHAM.

Model Hukum ini dimaksudkan agar sebisa mungkin komprehensif, sembari mengakui bahwa ini akan menuntut adaptasi pada konteks nasional, serta kerangka kerja hukum nasional dan konstitusional. Ketentuan substantif dalam Model Hukum ini dimaksudkan, paling tidak, untuk menyediakan dasar perbandingan serta memberikan keberlakuan dan kekuatan hukum penuh untuk ketentuan yang relevan dalam Deklarasi PBB. Serangkaian ketentuan juga telah dimasukkan atau disampaikan melalui praktik baik yang mungkin melampaui kewajiban atau standar yang disertakan dalam Deklarasi PBB atau instrumen internasional lainnya.

Model Hukum ini juga dapat diadopsi dalam berbagai cara, tergantung pada konteks dan tradisi hukum nasional, termasuk melalui kombinasi undang-undang dan peraturan, atau undang-undang dan keputusan presiden atau eksekutif, atau undang-undang dan kebijakan.

19 <https://chr.gov.ph/statement-of-the-commission-on-human-rights-on-the-proposed-anti-terrorism-act-of-2020/>

20 <https://twitter.com/PDHgt/status/1407028163104886800>

21 <https://ishr.ch/defenders-toolbox/resources/model-law/>

Semua undang-undang nasional tentang perlindungan PHAM harus dikembangkan dan diimplementasikan melalui konsultasi erat dengan PHAM serta aktor masyarakat sipil lainnya serta menerapkan perspektif gender dan kepekaan terhadap situasi dan kebutuhan perlindungan terhadap PPHAM dan kelompok atau kategori pembela HAM yang rentan atau berisiko. Semua undang-undang untuk perlindungan PHAM harus mendapatkan dukungan politik tingkat tinggi dan disertai dengan sumber daya yang memadai untuk implementasi yang menyeluruh dan efektif.

Undang-undang tertentu untuk pengakuan dan perlindungan PHAM berdasarkan Model Hukum ini juga diperlukan, tetapi bukan elemen tersendiri yang memadai dalam kerangka kerja untuk lingkungan yang aman dan mendukung bagi pembela HAM. Bersama dengan undang-undang tertentu untuk perlindungan PHAM, setiap undang-undang atau kebijakan yang mengekang pekerjaan mereka juga harus ditinjau atau diubah.

Sejumlah elemen diperlukan untuk instrumen yang efektif guna melindungi PHAM, termasuk memastikan bahwa elemen tersebut:

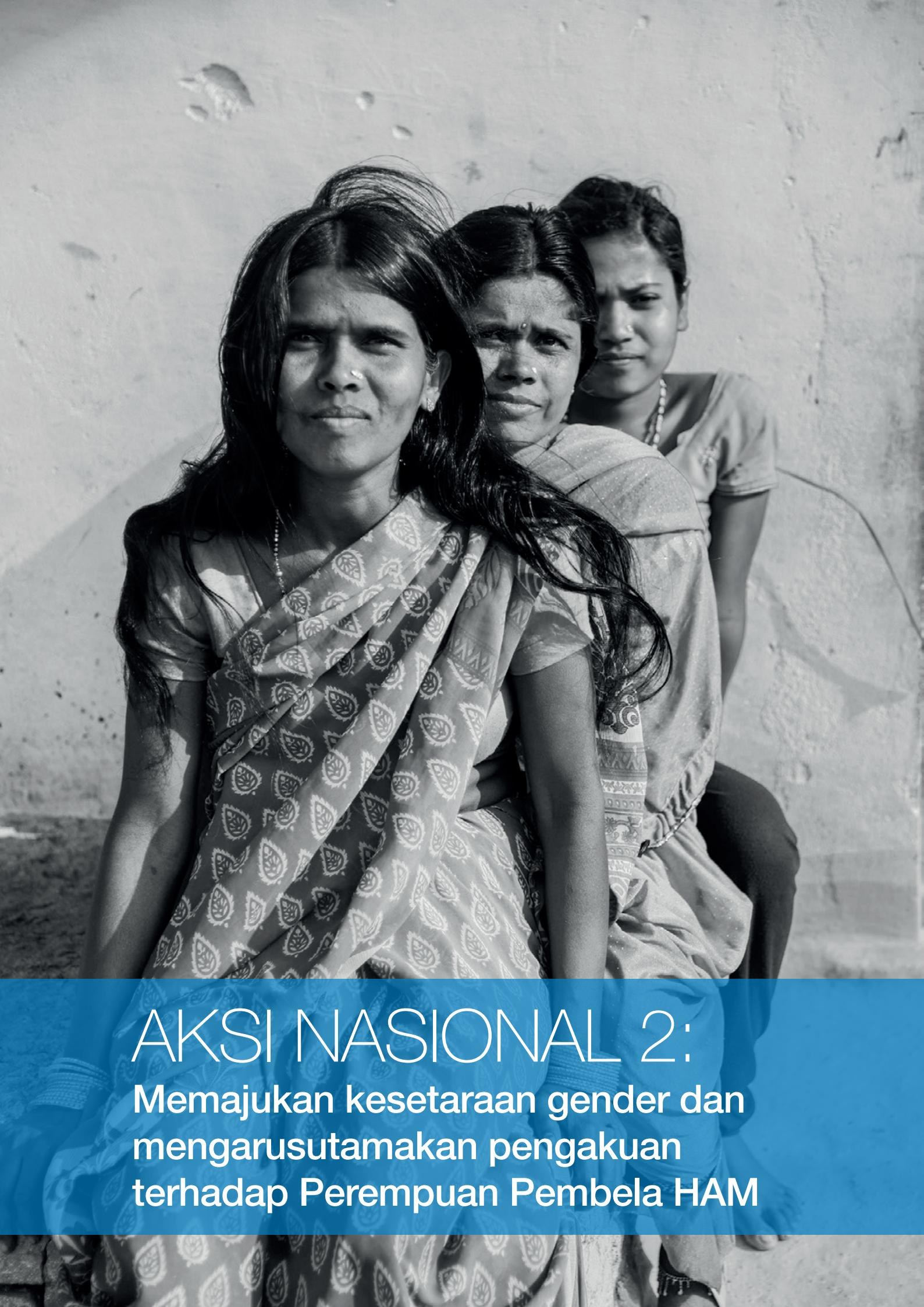
1. Dikembangkan melalui konsultasi erat dengan masyarakat sipil;
2. Mendapatkan dukungan politik tingkat tinggi;
3. Tidak berupaya membebaskan 'tanggung jawab' pada PHAM;
4. Memuat ketentuan yang mengakui dan merespons risiko dan/atau kerentanan dan kebutuhan perlindungan tertentu;
5. Menyampaikan kewajiban aktor Negara dan non-Negara; dan
6. Memuat ketentuan penegakan, hukuman, dan upaya pemulihan.
7. Mekanisme pelindungan memiliki sumber daya yang memadai serta melibatkan PHAM dalam tata kelola dan pengambilan keputusan.

Seperti dinyatakan dalam *sub-bagian D di atas*, perlu diketahui bahwa sejumlah pemerintah dapat menyusun dan mengesahkan undang-undang perlindungan PHAM, yang pada kenyataannya mengekang hak-hak PHAM, atau memuat ketentuan tertentu yang dapat mengekang PHAM. Salah satu contohnya adalah undang-undang perlindungan PHAM di Mongolia, yang memuat banyak ketentuan yang menguntungkan PHAM, tetapi beberapa ketentuan lain justru berupaya mengekang hak-hak PHAM.

Studi Kasus:

'Undang-Undang Mongolia tentang status hukum Pembela HAM' dirayakan sebagai *undang-undang pertama yang secara khusus dirancang untuk melindungi PHAM* yang diadopsi di Asia. Meskipun demikian, sekalipun ada penolakan besar-besaran dari masyarakat sipil dan PHAM, beberapa ketentuan luas yang dapat dengan mudah digunakan untuk mengekang hak-hak pembela HAM disertakan dalam versi akhirnya.

Misalnya, undang-undang yang melarang pencemaran 'nama baik atau reputasi orang lain', ketentuan yang dapat disalahgunakan untuk membungkam atau mengkriminalisasi pembela HAM, *seperti yang terjadi dengan undang-undang nasional lainnya*. Undang-undang ini juga melarang pendanaan dari organisasi atau orang yang melakukan kegiatan yang dianggap sebagai 'teroris, ekstremis, atau yang membahayakan persatuan nasional', istilah umum yang dapat digunakan untuk memasukkan organisasi yang tidak disukai oleh pemerintah ke daftar hitam (black list). LNHAM di Mongolia telah aktif dalam keterlibatannya untuk memperkuat undang-undang.



AKSI NASIONAL 2:

Memajukan kesetaraan gender dan
mengarusutamakan pengakuan
terhadap Perempuan Pembela HAM

A. Pengakuan yang tegas terhadap PPHAM dalam kegiatan perlindungan dan promosi

RAR menempatkan Perempuan PHAM (PPHAM) sebagai yang terdepan dalam kerangka kerjanya untuk perlindungan dan promosi. Meskipun PHAM transgender dan non-biner menghadapi tantangan perlindungan yang berbeda dan terkadang lebih kompleks akibat identitas gender mereka, RAR tetap menganggap perempuan transgender sebagai PPHAM.

PPHAM rentan mengalami jenis risiko yang sama dengan yang dialami semua PHAM lainnya. Namun demikian, mereka juga rentan mengalami kekerasan berbasis gender atau risiko terkait gender tertentu karena mereka menantang norma gender yang ada di komunitas dan masyarakat mereka.

Selain gender, ada banyak faktor ekonomi, sosial, budaya, dan geografi yang memengaruhi bagaimana PPHAM mengalami pelanggaran. Faktor-faktor ini mencakup kelas, agama, usia, bahasa, orientasi seksual, lokasi, ras, dan etnis.

Faktor risiko ini seringkali diperbarui oleh berbagai konteks di mana PPHAM tinggal dan bekerja. Misalnya, dalam konteks militer, kekerasan berbasis seksual dan gender digunakan oleh aktor negara dan non-negara untuk “menegaskan atau menegaskan kembali hierarki terkait gender tertentu dan/atau aspek sosial/politik lainnya” dan sebagai “senjata perang”.²² Dalam rezim otoriter, PPHAM dapat dipandang sebagai “menantang kesenjangan sosial yang ada atau mengungkap kekurangan rezim politik dan pemerintah.”²³

Demikian pula, PPHAM yang bekerja dalam konteks jika terdapat fundamentalisme agama dan budaya memiliki risiko diserang lebih besar dibanding rekan pria mereka karena mereka dianggap melanggar norma sosial. Kekerasan terhadap PPHAM mungkin terkait gender tertentu atau bermuatan seksual sebagai suatu cara untuk “menetapkan kembali peran ‘tradisional’ kepada perempuan.”²⁴ Terakhir, pertumbuhan dan pengaruh perusahaan transnasional juga memiliki peran besar dalam melakukan kekerasan terhadap PPHAM dan masyarakat yang menantang mereka.²⁵

PPHAM membutuhkan perlindungan yang spesifik dan responsif terhadap gender. Sekalipun kini ada berbagai materi tentang risiko yang dihadapi oleh PPHAM, seperti Laporan dari Koalisi Internasional Perempuan Pembela HAM [Women Human Rights Defenders International Coalition] yang berjudul “Our Right To Safety: Women Human Rights Defenders’ Holistic Approach to Protection”, dan meskipun beberapa risiko yang dihadapi oleh PPHAM mungkin serupa di seluruh dan di dalam wilayah, risiko lainnya akan berbeda sesuai konteks nasional. Sebagai langkah awal, Anda harus berkonsultasi dengan PPHAM untuk mendapatkan pemahaman tentang kebutuhan perlindungan khusus mereka serta risiko yang mereka hadapi dalam konteks nasional tertentu. Anda juga harus berkonsultasi dengan PPHAM untuk menentukan cara terbaik untuk mendukung pekerjaan mereka, termasuk dengan kampanye peningkatan kesadaran dan program advokasi.

PPHAM memandang kurangnya pengakuan atas kontribusi substantif mereka terhadap gerakan HAM sebagai salah satu bentuk kekerasan.²⁶ Dalam hal ini, LNHAM yang secara terbuka menyuarakan risiko dan kebutuhan perlindungan terhadap PPHAM, akan meningkatkan kesadaran akan situasi spesifik mereka. Selain hal ini, Anda dapat bertindak sebagai penghubung penting antara perwakilan pemerintah dan PHAM. Dengan cara ini, PPHAM di negara Anda akan memandu Anda tentang cara menyampaikan risiko dan kebutuhan perlindungan khusus kepada pemerintah di negara mereka sehingga pemerintah beraksi dengan mengakui dan memberikan pertimbangan khusus untuk PPHAM.

22 Women Human Rights Defenders International Coalition [Koalisi Internasional Perempuan Pembela HAM]. Global Report on the Situation of Women Human Rights Defenders [Laporan Global tentang Situasi Perempuan Pembela HAM]. hal. 26. 2012. Web. Januari 2014. https://defendingwomen-defendingrights.org/wp-content/uploads/2014/03/WHRD_IC_Global-Report_2012.pdf

23 Women Human Rights Defenders International Coalition [Koalisi Internasional Perempuan Pembela HAM]. Global Report on the Situation of Women Human Rights Defenders [Laporan Global tentang Situasi Perempuan Pembela HAM]. hal. vi. 2012. Web. Januari 2014. https://defendingwomen-defendingrights.org/wp-content/uploads/2014/03/WHRD_IC_Global-Report_2012.pdf

24 Women Human Rights Defenders International Coalition [Koalisi Internasional Perempuan Pembela HAM]. Global Report on the Situation of Women Human Rights Defenders [Laporan Global tentang Situasi Perempuan Pembela HAM]. hal. 7. 2012. Web. Januari 2014. https://defendingwomen-defendingrights.org/wp-content/uploads/2014/03/WHRD_IC_Global-Report_2012.pdf

25 https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/Our%20Right%20To%20Safety_FINAL.pdf

26 https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/Our%20Right%20To%20Safety_FINAL.pdf

Kampanye peningkatan kesadaran, program advokasi, program untuk memperkuat perlindungan hukum nasional atau aksi lainnya oleh LNHAM harus dikembangkan dengan mempertimbangkan risiko yang dihadapi oleh PPHAM dan kebutuhannya. Risiko yang dihadapi dan kebutuhan perlindungan PPHAM harus dipertimbangkan dalam implementasi setiap aksi nasional yang disertakan dalam Panduan ini, yang mengarusutamakan pendekatan gender untuk semua aksi.

B. Pemilahan data menurut gender

Faktor lain yang membantu melanggengkan kekerasan terhadap PPHAM adalah kurangnya pengakuan dan dokumentasi tentang kekerasan tersebut. Misalnya, PPHAM mungkin ditahan dalam unjuk rasa, dan mereka mungkin juga dilecehkan secara seksual dan ditindas secara lisan oleh petugas yang menahan mereka, meskipun pelecehan tersebut mungkin tidak diakui atau dilaporkan. Demikian pula, data yang mendokumentasikan kekerasan terhadap pembela HAM sering kali tidak dipisahkan menurut gender, serta tidak ada indikator untuk menganalisis kekerasan tertentu terhadap PPHAM. Dampak tambahan dari kurangnya data ini menghasilkan lebih sedikit materi untuk perlindungan khusus bagi PPHAM.²⁷

Sebagaimana didefinisikan dalam Panduan APF untuk Pemantauan, Evaluasi, Akuntabilitas, dan Pembelajaran (MEAL),²⁸ data yang dipisahkan merupakan data yang dikumpulkan, dianalisis, dan disajikan secara terpisah, menurut sub-kategori, yang memungkinkan analisis yang lebih besar dan identifikasi tren/diskriminasi, mis. data yang dipisahkan menurut gender.

Data dan informasi yang dipisahkan menurut gender memungkinkan seseorang untuk menilai pelanggaran yang sedang terjadi serta mengembangkan respons dan kebijakan berbasis bukti yang sesuai. Idealnya, data tersebut dikumpulkan yang mencakup beberapa tahun untuk melacak perubahan dan mengambil aksi perbaikan. Organisasi masyarakat sipil, seperti LSM, organisasi hak-hak perempuan dan PHAM, dapat menjadi sekutu berharga dalam mengumpulkan informasi tentang dampak yang mungkin atau sebenarnya terjadi dari kebijakan, dan mereka harus selalu diajak berkonsultasi secara berkala.

Penting untuk diingat bahwa data yang dipisahkan menurut gender tidak boleh terlalu berfokus pada 'perempuan saja'. PHAM non-biner, laki-laki dan perempuan transgender, dan lainnya dengan identitas, ekspresi gender, dan karakteristik seksual yang menempatkan mereka dalam situasi rentan tertentu juga harus dipertimbangkan.

Anda juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran tentang ahli statistik dan perwakilan kementerian pemerintah terkait isu gender melalui kampanye informasi dan program pelatihan.

Beberapa contoh pemilahan data berbasis gender di tingkat nasional ditemukan dalam 'Toolkit untuk Pengarusutamaan dan Pengimplementasian Kesetaraan Gender' dari OECD.²⁹ APF dapat memberikan pelajaran dan informasi tentang cara memastikan bahwa data pelanggaran terhadap PHAM dipisahkan menurut gender.

27 https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/Our%20Right%20To%20Safety_FINAL.pdf

28 https://www.google.com/url?q=https://www.asiapacificforum.net/resources/monitoring-evaluation-accountability-and-learning-guide-national-human-rights-institutions/&sa=D&source=docs&ust=1637346715487000&usg=AOvVaw27_lucT1tMwipZuFQQJUZy

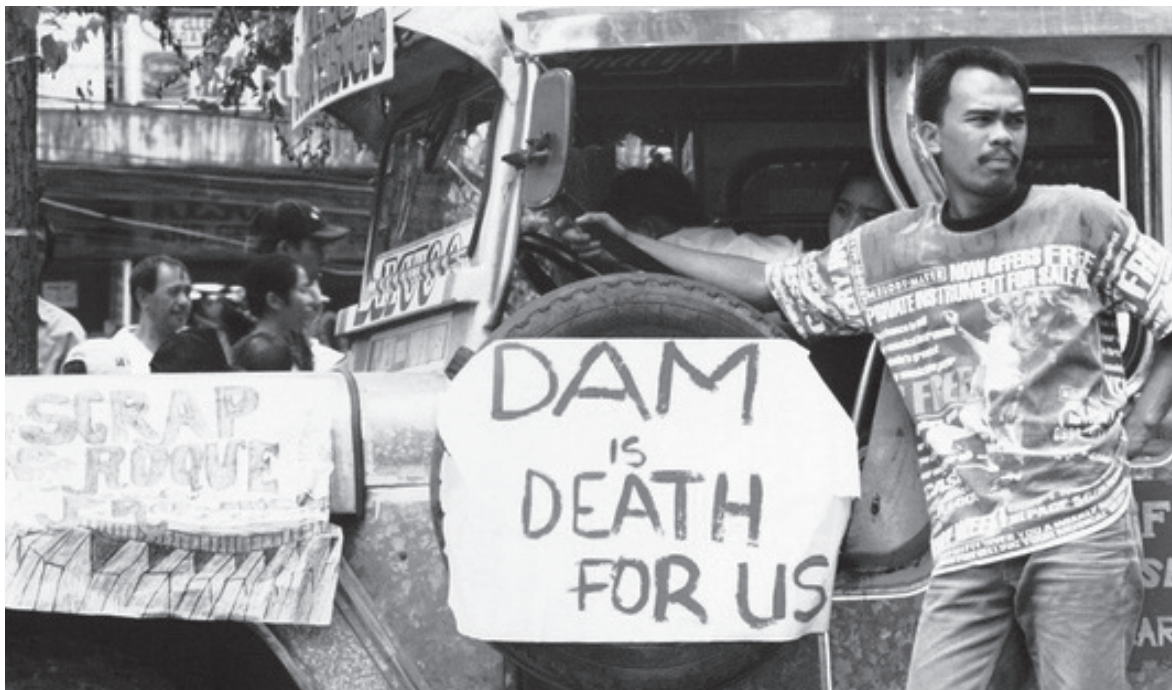
29 www.oecd.org/gender/governance/toolkit/government/assessment-of-gender-impact/disaggregated-data/

C. Perlindungan terhadap PHAM transgender dan non-biner

Sesuai Strategi Kesetaraan Gender 2019 APF, APF akan mendukung anggota untuk mengarusutamakan gender dalam konteks identitas yang beragam, dan mengakui perempuan termasuk juga perempuan dan remaja perempuan transgender. APF juga akan memastikan bahwa tugas pengarusutamaan gender termasuk komponen bertarget tentang PHAM transgender dan non-biner. PHAM transgender dan non-biner bahkan menghadapi ancaman kekerasan dan intimidasi yang lebih besar dibanding PPHAM.

LNHAM Anda dapat berperan penting dalam peningkatan kesadaran dan komunikasi tentang risiko spesifik yang dihadapi oleh PHAM transgender dan gender non-biner. Ini harus selalu dipandu oleh dan melalui konsultasi bersama PHAM transgender dan non-biner. Khususnya dalam konteks nasional jika sistem hukum atau sudut pandang masyarakat tentang gender sepenuhnya biner atau mengkritik PHAM transgender atau non-biner, maka penilaian risiko keamanan harus selalu diselesaikan bersama PHAM transgender dan non-biner sebelum melakukan kampanye atau aksi terkait pelanggaran terhadap mereka, sejalan dengan pendekatan 'jangan merugikan' yang tercantum di bagian awal panduan ini.

APF akan menyediakan materi dan program pelatihan tentang *pengarusutamaan gender*³⁰ dan bagaimana hal tersebut dapat diterapkan oleh anggota dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari, ini juga akan mencakup PHAM transgender dan non-biner.



30 <https://www.asiapacificforum.net/resources/nhri-guidelines-mainstreaming-rights-women/>



AKSI NASIONAL 3:

**Meningkatkan kesadaran tentang
hak-hak Pembela HAM**

Informasi adalah kunci untuk menggunakan HAM secara efektif. Dengan informasi yang tepat tentang hak-hak kita sendiri, kita tahu apa yang kita dapat menuntut untuk dihormati dan dipenuhi; dengan informasi yang tepat tentang hak-hak orang lain, kita tahu cara menghormati dan memajukan hak-hak tersebut.

Situasi ini tidak berbeda dalam kasus PHAM. Tidak semua agen Negara tahu tentang Deklarasi PBB tentang PHAM dan kewajiban mereka terkait hal tersebut. Demikian pula, tidak semua orang yang membela HAM mengetahui hak-hak yang dimuat dalam Deklarasi tersebut. Selain itu, peningkatan pemahaman tentang pekerjaan PHAM yang sah dapat mendukung tugas mereka dan meningkatkan dampaknya. Misalnya, tugas PHAM sering kali mencakup keinginan untuk memengaruhi pengambilan keputusan di tingkat tinggi, dengan tekanan politik yang menjadi alat mutlak untuk mendapatkan hasil yang nyata. Pengaruh politik jarang dapat dicapai tanpa dukungan dan kesadaran.

Dan kurangnya dukungan publik terhadap PHAM juga dapat memengaruhi keamanan dan integritas mereka. Sikap negatif terhadap PHAM dapat meningkatkan serangan, dan kurangnya perhatian serta kemarahan masyarakat terhadap pelanggaran ini dapat meningkatkan impunitas.³¹

Bagian ini akan menelusuri tindakan yang dapat diambil oleh LNHAM Anda untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak PHAM baik secara internal (dalam lembaga Anda) maupun secara eksternal (dengan masyarakat).

A. Mengarusutamakan hak-hak PHAM dalam kegiatan promosi LNHAM

Untuk memajukan hak-hak PHAM secara eksternal, situasi mereka perlu diketahui dengan baik dan diarusutamakan di dalam lembaga itu sendiri.

i. Mengarusutamakan hak-hak PHAM dalam LNHAM Anda

Dalam konteks ini, mengarusutamakan berarti memastikan bahwa pertimbangan tentang hak-hak dan kebutuhan perlindungan PHAM ada di berbagai elemen tugas yang Anda lakukan, dan bahwa pertimbangan tersebut tidak dikotak-kotakkan, atau dipisahkan dari pertimbangan lainnya.

Seperti dijelaskan dalam *Aksi Nasional 4* di bawah, LNHAM Anda dapat menetapkan **Narahubung PHAM** yang dapat membantu memastikan bahwa masalah yang relevan dengan PHAM diarusutamakan di seluruh lembaga.

Narahubung PHAM Anda, atau apa pun instansi yang Anda tetapkan untuk memimpin kegiatan promosi hak-hak PHAM di LNHAM Anda, dapat memiliki fungsi berikut:³²

- Berperan sebagai konsultan untuk proses-proses dalam LNHAM untuk mengarusutamakan sudut pandang PHAM.
- Memantau pekerjaan LNHAM serta memberi saran tentang elemen mana yang relevan untuk PHAM untuk dipertimbangkan lebih lanjut di seluruh LNHAM.
- Mengumpulkan, menganalisis, dan menerjemahkan pengetahuan ke LNHAM yang lebih luas tentang PHAM dan hak-hak mereka.
- Berperan sebagai pusat kontak dan hub pelatihan bagi organisasi dan LNHAM lainnya dengan menyediakan program pelatihan untuk staf tentang PHAM.

ii. Mengarusutamakan peran PHAM dalam kampanye dan komunikasi tentang berbagai masalah tematik

Pengarusutamaan peran PHAM dalam komunikasi eksternal melibatkan penyertaan elemen PHAM dalam berbagai materi komunikasi dan kampanye, bahkan saat hal tersebut tidak secara spesifik terfokus pada PHAM. Hasil dari perubahan tersebut jelas karena PHAM bersifat fundamental dalam kegiatan promosi dan perlindungan hak-hak serta konsep negara hukum (rule of law).

Selain itu, partisipasi aktif PHAM yang menangani tema yang relevan dapat memberikan masukan yang berharga bagi pekerjaan Anda, dan partisipasi mereka dalam kampanye dapat berfungsi dalam

31 <https://static1.squarespace.com/static/58a1a2bb9f745664e6b41612/t/5f7eddb62c1737355da32499/1618482603792/Policy+Brief+9+%28English%29.pdf> hal. 5

32 <https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/document/Lorion%20Defining%20GHRFPs%20-%20DIHR%202021%20Final.pdf> hal. 58

meningkatkan efektivitas kampanye. Jika PHAM dari masyarakat setempat berpartisipasi dalam kegiatan dan kampanye Anda, selama aman untuk dilakukan, hal ini dapat mendorong masyarakat dari lingkungan sekitar untuk mengambil bagian karena mereka melihat seseorang dari lingkungan mereka ikut terlibat.

Perlu diketahui bahwa LNHAM Anda melakukan kegiatan dan kampanye Anda secara spesifik terkait dengan hak-hak PHAM (lihat [Bagian C](#) dari Aksi Nasional ini di bawah).

B. Kontranarasi terhadap PHAM³³

RAR menyoroti pentingnya menghadapi pencemaran, fitnah, dan kampanye hitam yang sering dialami oleh PHAM saat melakukan kegiatan peningkatan kesadaran untuk mereka.³⁴ Kampanye hitam, serta wacana yang membenarkan tindakan penyerang memiliki dampak serius terhadap PHAM dan pekerjaan mereka. Narasi tersebut dapat mengubah sikap masyarakat terhadap PHAM sehingga menyebabkan hilangnya dukungan untuk pekerjaan mereka, menghambat upaya perlindungan, dan bahkan mendorong agresi baru.³⁵

Dalam hal ini, terdapat kebutuhan mendesak untuk menyusun strategi yang ditujukan untuk menghadapi narasi yang menjelekkan PHAM. Strategi yang efektif tidak hanya untuk memastikan keamanan dan kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan, namun juga harus relevan dalam konteks nasional. Beberapa langkah untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam hal ini, Anda harus:³⁶

- Menyelidiki persepsi publik dan bagaimana cara media dalam menggambarkan PHAM dan pekerjaan mereka.
- Mengumpulkan aktor di luar lingkup HAM, seperti jurnalis, politisi, dan tokoh masyarakat yang terkenal, untuk memeriksa narasi tentang PHAM. Mendiskusikan potensi pendekatan dan strategi untuk mengubah narasi bersama kelompok tersebut.
- Mempertimbangkan narasi positif saat menyampaikannya, termasuk menyoroti nilai-nilai yang dilindungi oleh PHAM alih-alih tindakan individu yang mereka lakukan. Dalam melakukan hal ini, hindari menggambarkan mereka sebagai “pahlawan” karena ini dapat mengalihkan perhatian dan rasa tanggung jawab dari mereka yang melanggar HAM PHAM.

i. Narasi positif tentang PHAM

Anda harus memberi perhatian khusus terhadap narasi yang lebih luas yang dikembangkan seputar PHAM.

Narasi tentang PHAM sering kali negatif, termasuk yang fokus pada hambatan yang mereka hadapi, serangan, dan tindakan pembalasan yang rentan mereka alami. Meskipun memang penting untuk menyoroti kesulitan yang dialami PHAM untuk mendapatkan pengawasan publik, wacana seperti ini juga dapat memiliki dampak merugikan, yakni menganggap pelanggaran terhadap hak-hak PHAM sebagai hal yang normal.

Tersebarinya berita-berita negatif tentang PHAM juga dapat memberikan dampak yang menghilangkan kepekaan sehingga membuat audiens secara naluriah mengaitkan pekerjaan pembela HAM dengan tindakan pembalasan dan bahaya. Ini dapat menjadi kontraproduktif karena dapat mengurangi dampak dari cerita yang disampaikan, dan pada yang sama mencegah calon pembela HAM untuk terlibat dalam tugas ini.

Oleh karenanya, perubahan wacana menjadi berguna dan diperlukan agar pesan dapat mencapai audiens yang lebih luas dan memiliki dampak yang lebih kuat. Berikut adalah beberapa tips untuk mencapai hal ini:³⁷

- Memfokuskan narasi Anda pada manfaat nyata dan pentingnya pekerjaan PHAM, beserta pencapaian dan sasaran mereka, bukan pada bahaya dan risiko yang mereka hadapi.
- Merayakan keberagaman, namun juga menyoroti keinginan, kepentingan, karakteristik, dan target kemanusiaan bersama dan yang sedang dimajukan oleh PHAM.

33 <https://www.google.com/url?q=https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/2017-Roundtable-report-EN.pdf&sa=D&source=editors&ust=1632243783827000&usq=AOvVaw2KT4x5vgXGIC85E0QOGgH>

34 RAR halaman 27

35 <https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/2017-Roundtable-report-EN.pdf> hal.11

36 <https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/2017-Roundtable-report-EN.pdf> hal.11, 13

37 <https://ishr.ch/defenders-toolbox/resources/new-narratives-a-seat-at-the-table/> hal. 3, 4, 9, 10

- Mengingat bahwa siapa pun dapat menjadi PHAM dan ada kepentingan dan tanggung jawab bersama dalam melindungi HAM. Mengingatkan audiens bahwa siapa pun dan setiap orang dapat, dan harus, berkontribusi terhadap pemenuhan hak asasi manusia, termasuk dengan menghormati dan mendukung pekerjaan PHAM.
- Menyampaikan kisah PHAM, jangan biarkan narasi Anda menjadi respons untuk lawan Anda (atau mereka).
- Memotivasi audiens untuk berkontribusi dengan menyebutkan hari esok yang lebih baik sedang diupayakan dan masa kini yang lebih baik yang telah tercapai adalah berkat pekerjaan-pekerjaan hak asasi manusia.
- Mengetahui aspirasi, keluhan, kebutuhan, dan harapan target audiens Anda. Menyesuaikan pesan Anda dengan semestinya.
- Memastikan bahwa pesan Anda dapat menyediakan jawaban yang jelas untuk pertanyaan berikut:
 - Apa saja nilai-nilai Anda?: Memfokuskan pada nilai-nilai universal (keadilan, perdamaian, kebebasan) yang selaras dengan ide bahwa hak asasi manusia hadir sebagai pengakuan terhadap martabat yang melekat pada setiap manusia.
 - Apa visi Anda?: Memotivasi audiens dengan membantu mereka menggambarkan sejauh mana dunia dapat menjadi lebih baik.
 - Masalah apa yang coba Anda selesaikan?: Menggambarkan masalah yang jelas, nyata, dan spesifik. Penggunaan istilah yang luas dapat memberikan kesan seolah-olah ada pengaruh kekuatan besar yang tak terbendung, yang pada gilirannya akan membuat banyak orang enggan untuk membantu. Jika aman, sebutkan nama mereka yang bertanggung jawab.
 - Apa solusi Anda dan apa yang Anda butuhkan agar berhasil? Sampaikan secara jelas langkah spesifik apa yang dapat diambil di berbagai tingkat untuk mencapai perubahan. Jangan pernah membuat jumlah pekerjaan terlihat sangat menakutkan. Ingatkan orang bahwa mereka memang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan.
- Beri contoh dan pastikan bahwa lembaga Anda benar-benar dipandu oleh prinsip-prinsip yang disuarakannya. Proyek yang terkait kelompok tertentu (seperti perempuan atau masyarakat adat) harus dipimpin atau setidaknya dipandu oleh orang dari dalam kelompok tersebut.
- Kaitkan istilah “hak asasi manusia” dengan konsep positif, bukan dengan konsep negatif (kejahatan, pelanggaran, perang).

C. Mengembangkan kampanye spesifik tentang hak-hak PHAM

LNHAM Anda dapat mendorong kesadaran dan penerimaan publik tentang hak untuk membela hak-hak, bahwa bekerja sebagai seorang PHAM merupakan cara yang sah untuk menuntut perubahan kebijakan, dan bahwa pemerintah maupun entitas swasta sebaiknya tidak boleh menghalangi pekerjaan PHAM. Seperti didiskusikan dalam *Aksi Nasional 2*, kampanye peningkatan kesadaran dan program advokasi harus dikembangkan dengan mempertimbangkan risiko yang dihadapi dan kebutuhan PPHAM.

i. Peningkatan kesadaran tentang kebutuhan dan situasi PHAM

Legitimasi, akses, dan sumber daya LNHAM memberikan kartu truf yang bermanfaat yang dapat digunakan untuk mendukung PHAM saat bernegosiasi dengan pemerintah atau dunia usaha.

Saat ini terdapat kebutuhan mendesak untuk mengadopsi pendekatan preventif terkait hak-hak PHAM. Ini menyiratkan keterlibatan dengan pemangku kepentingan dan menyampaikan kewajiban serta tanggung jawab mereka terhadap PHAM sehingga mereka bertindak sesuai dengan standar internasional. Kampanye tersebut dapat mencakup materi, seperti laporan Centre for Justice and International Law dan Protection International terkait kebijakan publik yang efektif untuk hak membela hak asasi manusia, yang bertujuan untuk meningkatkan kebijakan perlindungan.³⁸ LNHAM Anda dapat menggunakan laporan ini atau membuat laporan serupa untuk diskusi dengan instansi pemerintah, mendorong mereka untuk mengadopsi atau meningkatkan program perlindungannya.

38 <https://www.protectioninternational.org/en/%C2%A1-time-now-%E2%80%93-effective-public-policies-right-defend-human-rights>

Untuk dunia usaha, LNHAM Anda dapat mengadakan rapat, dialog terbuka, kursus pelatihan, atau membekali mereka dengan materi agar mereka memahami *Prinsip-Prinsip Panduan PBB Mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGP)*, serta standar lainnya yang relevan.

ii. Peningkatan kesadaran tentang pelanggaran terhadap PHAM

LNHAM Anda juga dapat meningkatkan kesadaran tentang pelanggaran hak-hak yang dibela oleh PHAM atau hak-hak mereka sendiri. Ini dapat dilakukan melalui pernyataan publik, publikasi, media sosial, atau kampanye media lainnya, konferensi, acara, penyerahan dokumen kepada badan dan mekanisme internasional (baca *Aksi Nasional 7*), serta kontak langsung dengan pihak berwenang.

Aksi ini harus ditujukan untuk memperkuat pesan PHAM, dan semua aksi tentang PHAM, dilakukan melalui konsultasi dengan mereka.

Studi Kasus:

PHAM hak atas tanah di Thailand berjuang memprotes proyek konstruksi yang berdampak terhadap hak lingkungan dan masyarakat sekitar, termasuk dengan menggunakan tentara untuk mengusir paksa warga dari wilayah tersebut. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Thailand telah meningkatkan kesadaran tentang situasi tersebut di tingkat internasional dan nasional, yang menekan pihak yang berwenang setempat sehingga proyek tersebut dihentikan untuk sementara dan mendesak diadakannya rapat untuk membahas solusi alternatif.³⁹

iii. Peningkatan kesadaran tentang hak-hak PHAM

Promosi hak-hak PHAM juga harus mengedukasi masyarakat tentang konsep-konsep dasar dari pekerjaan hak asasi manusia dan nilai yang dibawah oleh PHAM ke masyarakat.

Saat LNHAM menunjukkan dukungan publik untuk PHAM, termasuk melalui pernyataan publik atau kampanye, misalnya di media sosial - hal ini meningkatkan visibilitas dan legitimasinya, seperti yang disebutkan di atas, LNHAM biasanya dapat menjangkau audiens yang lebih luas serta sifat kelembagaan dan publik dari tugas mereka memberikan bobot pada pesan yang mereka sampaikan.⁴⁰

Kerja sama dengan lembaga lainnya, seperti pemerintah, organisasi internasional, atau dunia usaha, dapat memperkuat kampanye. Media memainkan peran yang tak terbantahkan dalam membentuk opini publik sehingga bekerja sama dengan media dapat lebih mencapai tujuan dibanding sekadar memberi tekanan kepada pemerintah.⁴¹ Kampanye media dapat digunakan untuk mengedukasi tentang siapa itu PHAM, konsep-konsep dasar dari pekerjaan PHAM, serta hak-hak pembela HAM.

iv. Kegiatan yang secara spesifik difokuskan pada PPHAM

Kampanye peningkatan kesadaran, program advokasi, program untuk memperkuat perlindungan hukum nasional atau aksi lainnya oleh LNHAM harus dikembangkan dengan mempertimbangkan risiko yang dihadapi oleh PPHAM dan kebutuhannya. Selain hal ini, LNHAM Anda juga dapat melakukan kegiatan yang memiliki fokus khusus pada PPHAM, yang berupaya mengedukasi yang lain dan merespons kebutuhan perlindungan khusus bagi PPHAM.

Tiap kegiatan yang secara khusus difokuskan pada PPHAM, harus dipandu oleh dan dikembangkan melalui konsultasi dengan PPHAM. Mereka misalnya dapat membahas stereotipe gender serta konstruksi sosial lainnya yang merusak, pelecehan seksual, dan pentingnya partisipasi yang setara serta kesetaraan gender.

39 <https://static1.squarespace.com/static/58a1a2bb9f745664e6b41612/t/5f7eddb62c1737355da32499/1618482603792/Policy+Brief+9+%28English%29.pdf> hal. 5

40 <https://static1.squarespace.com/static/58a1a2bb9f745664e6b41612/t/5f7eddb62c1737355da32499/1618482603792/Policy+Brief+9+%28English%29.pdf> hal. 5

41 <https://static1.squarespace.com/static/58a1a2bb9f745664e6b41612/t/5f7eddb62c1737355da32499/1618482603792/Policy+Brief+9+%28English%29.pdf> hal. 5

D. Melakukan kampanye peningkatan kesadaran di antara PHAM

LNHAM dapat berperan penting dalam kampanye peningkatan kesadaran di antara PHAM. Misalnya, sejumlah orang yang membela hak asasi manusia tidak memahami kerangka kerja internasional yang melindungi PHAM atau apa definisi dari PHAM. Lainnya belum terlibat dengan mekanisme atau badan HAM internasional atau regional, atau tidak terhubung dengan jaringan atau gerakan.

Oleh karena itu, LNHAM Anda harus melaksanakan kegiatan ini untuk menyediakan informasi yang sesuai kepada PHAM untuk melindungi hak-hak mereka. LNHAM Anda dapat mengadakan pertemuan (konferensi, lokakarya, dialog) atau mempublikasikan sumber daya (situs daring, buklet, laporan) tentang beberapa topik berikut:

- Apa dan siapa itu PHAM serta apa saja hak-hak mereka?
- Mengembangkan kapasitas perlindungan Anda:
 - Kerangka kerja hukum nasional dan internasional yang relevan dengan PHAM.
 - Mekanisme nasional dan internasional yang tersedia untuk melindungi PHAM. Apa saja mekanisme tersebut dan bagaimana cara menggunakannya?
 - Bagaimana cara menggunakan sistem hukum untuk melindungi hak-hak Anda dan hak-hak orang lain. Tips tentang litigasi strategis.

Studi Kasus:

Protection International (PI) mempublikasikan video yang berjudul “10 Steps to Improve your Protection While Defending Human Rights [10 Langkah untuk Meningkatkan Perlindungan Anda Sekaligus Membela HAM]”⁴² dan memiliki manual perlindungan dan materi lainnya untuk PHAM.⁴³ Lembaga ini juga telah mengadakan pertemuan antara para pembela HAM dari berbagai wilayah untuk mendiskusikan pengalaman dan praktik terbaik.⁴⁴

Jika LNHAM Anda ingin melaksanakan kegiatan pelatihan tentang topik ini, Protection International telah menyusun “Guide for Facilitators” [Panduan untuk Fasilitator] yang mungkin dapat membantu. Panduan ini memuat saran praktis untuk menyusun dan menyiapkan sesi lokakarya yang berhubungan dengan perlindungan PHAM.⁴⁵

Apa pun kegiatan yang Anda putuskan, Anda harus memastikan bahwa bentuk penguatan kapasitas ini benar-benar memberdayakan PHAM dan tidak mengecilkan hati mereka dengan bersikap paternalistik dan sombong. Penguatan kapasitas dapat kontraproduktif jika:⁴⁶

- Mengabaikan atau tidak memahami pengalaman hidup PHAM serta konteks seputar pekerjaan mereka.
- Menggunakan pendekatan preskriptif atas analisis risiko:
 - Mengabaikan kebutuhan dan identitas khusus dari tiap PHAM.
 - Tidak mempertimbangkan kekuatan hubungan dan karakteristik PHAM saat sendiri atau saat bersinggungan dengan satu sama lain menimbulkan kerentanan tertentu (mis. gender, SOGIESC, ras)
 - Mengusulkan langkah perlindungan “satu metode untuk semua”.
 - Secara langsung atau tidak langsung mendiskriminasi PHAM tertentu dengan secara efektif mengecualikan mereka dari langkah perlindungan

42 www.protectioninternational.org/en/videos/10-steps-improve-your-protection-while-defending-human-rights

43 www.protectioninternational.org/en/defender-tools/publications-new-protection-manual-human-rights-defenders

44 www.protectioninternational.org/en/videos/collective-power-regional-exchange-thai-and-indonesian-hrds

45 <https://www.protectioninternational.org/en/protection-manuals/guide-facilitators>

46 <https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/2017-Roundtable-report-EN.pdf> hal. 6, 7, 9, 10, 12, 14

- Mengecualikan PHAM dari persiapan dan fasilitasi acara. PHAM diperlakukan sebagai orang yang harus “diajar” dan tidak setara dengan fasilitator.
- Mengucilkan PHAM tertentu, baik karena identitasnya, gerakan yang mereka bela, afiliasi politiknya, atau jenis pekerjaan yang mereka lakukan.
- Menempatkan ekspektasi yang tidak realistis pada PHAM, misalnya mereka semua harus menjadi martir atau menggunakan wacana yang menggambarkan mereka sebagai pahlawan atau manusia super.
- Sangat fokus pada hal-hal negatif (risiko, ancaman, impunitas) yang dapat menimbulkan ketakutan dan keengganan.
- Mengabaikan dimensi kolektif dari pekerjaan hak asasi manusia dan kebutuhan akan perlindungan kolektif.
- Partisipasi sangat sulit dan tidak berkelanjutan.
- Ada fokus pada perlindungan yang reaktif, bukan preventif.
- Dianggap sebagai daftar tugas alias to-do list.
- Hanya fokus pada risiko tinggi dan masalah keamanan langsung.
- Dianggap sebagai tujuan itu sendiri.

Sebaliknya, penguatan kapasitas memberi pemberdayaan jika:⁴⁷

- Mempertimbangkan pengalaman hidup PHAM dan konteks pekerjaan mereka.
- Bersifat inklusif terhadap PHAM dalam semua keragamannya dan memperlakukan mereka dengan setara.
- Wacana dan narasinya tidak menciptakan ekspektasi dan beban yang tidak realistis pada PHAM. juga menyebutkan aspek positif dan inspiratif yang untuk menyemangati mereka.
- Mempertimbangkan masyarakat dan dimensi kolektif dari hak asasi manusia dan pekerjaan yang berhubungan dengan hak asasi manusia
- Ada partisipasi yang berkelanjutan serta ruang permanen yang aman secara daring dan luring untuk berbagi praktik yang baik dan bertukar informasi.
- Berfokus pada hal yang dapat dilakukan oleh PHAM, bukan pada hal yang harus atau tidak boleh mereka lakukan.
- Menyediakan sarana untuk perlindungan preventif dan perlindungan dari berbagai jenis dan tingkat risiko.
- Dianggap sebagai sarana untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri, yakni merupakan proses yang berkelanjutan.

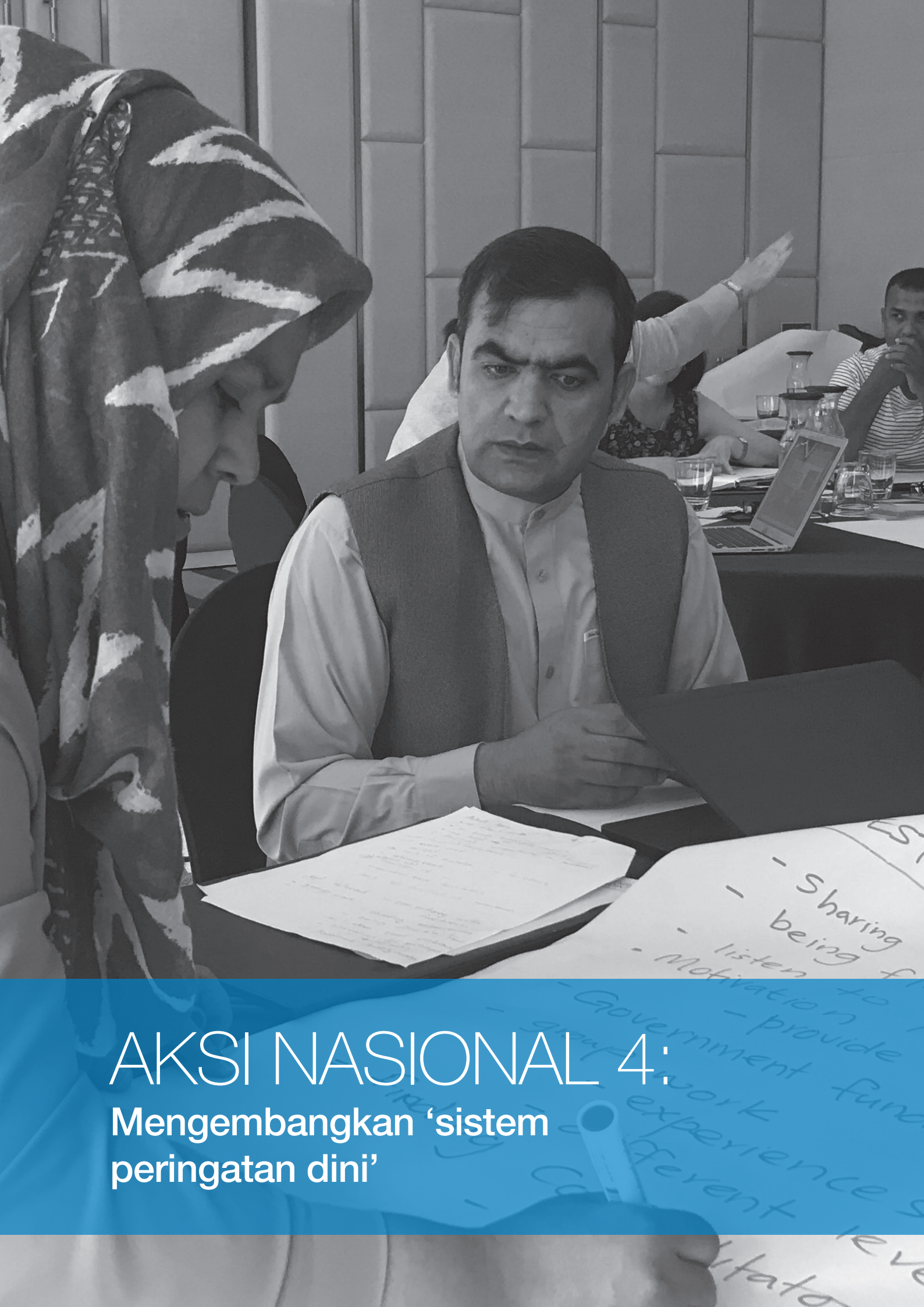
E. Membuat sumber daya penting yang tersedia dalam bahasa lokal

Akses informasi merupakan elemen penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi PHAM.⁴⁸ Di satu sisi, ini memungkinkan PHAM untuk mengetahui hak-hak mereka dan mendapatkan informasi yang mereka perlukan untuk menjalankan pekerjaannya (mis. resolusi dan undang-undang, dokumen pemerintah, laporan dari organisasi HAM); di sisi lain, ini memungkinkan masyarakat umum untuk mengetahui hak-hak mereka dan hak-hak PHAM, serta tanggung jawab pemerintah berkenaan dengan hal tersebut. Ini dapat membantu mengelola ekspektasi terkait peran dan tanggung jawab PHAM, serta bantuan dengan pengawasan publik sehubungan dengan data HAM di pemerintahan.

Untuk negara yang memiliki lebih dari satu bahasa, penerjemahan dokumen penting ke bahasa lisan di negara Anda dapat mencari cara yang simpel namun berdampak besar untuk mendukung PHAM. Ini dapat mencakup dokumen seperti Deklarasi PHAM PBB, resolusi PBB lainnya terkait dengan PHAM, rekomendasi, hasil pengamatan dan laporan yang disimpulkan dari organisasi HAM internasional. Jika suatu laporan relevan untuk penduduk tertentu atau suatu wilayah di negara Anda, dokumen yang tersedia dalam bahasa lokal menjadi serba penting.

⁴⁷ <https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/2017-Roundtable-report-EN.pdf> hal.10

⁴⁸ A/HRC/32/20



AKSI NASIONAL 4:

Mengembangkan 'sistem
peringatan dini'

- Sharing
- being f
- listen to
- Motivation
- Government fund
- group work
- experience s
- different leve
- facilitator

‘Sistem Peringatan Dini’ (SPD) merupakan perangkat yang diterapkan untuk memantau, mendeteksi, dan memprediksi situasi saat PHAM mungkin dalam kondisi rentan atau berisiko. Saat ancaman tersebut teridentifikasi, SPD dapat memberitahu Anda tentang potensi pelanggaran di masa mendatang sehingga Anda dapat mengambil langkah untuk mencegah atau merespons ancaman tersebut.⁴⁹ Karena fungsi SPD umumnya menganalisis data dan indikator yang ditetapkan sebelumnya, SPD dapat mendeteksi pola, potensi krisis perlindungan, faktor-faktor yang mendukung serangan, serta periode dan area dengan tingkat kerentanan terbesar.

Seperti yang tercantum pada awal Panduan ini, prinsip utama untuk tiap SPD adalah *keamanan komunikasi dengan PHAM*.

A. Pentingnya SPD⁵⁰

PHAM telah menekankan pentingnya langkah preventif, bukan reaktif.⁵¹ Meskipun pelanggaran dihentikan di tengah jalan atau pelakunya dikenai sanksi, masih akan ada konsekuensi buruk pada integritas korban dan juga pada masyarakat. Bukan semata karena serangan itu sendiri, namun juga karena kelelahan emosional dan waktu yang digunakan untuk mencari keadilan.

Dengan informasi sebelumnya dan pemantauan terus-menerus, deteksi ancaman pada tahap awal dan tindakan sigap dapat dilakukan untuk mencegah, bukan merespons, serangan dan pelanggaran. Organisasi hak asasi manusia telah mengakui pentingnya menyiapkan sistem guna menganalisis kemungkinan pola serangan, agresi, dan kendala yang dihadapi oleh PHAM.⁵²

Selain mencegah serangan tertentu, SPD dapat melacak serangan terhadap PHAM dan menganalisis polanya. Informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk memandu kebijakan publik yang berorientasi HAM. Juga dapat mengubah budaya keamanan sipil, dari salah satu budaya daya tanggap dan improvisasi, menjadi budaya pencegahan. LNHAM Anda juga dapat menarik perhatian masyarakat internasional dengan informasi ini (baca *Aksi Nasional 7*).⁵³

B. Fungsi SPD

SPD sangat penting dalam merespons konteks nasional dan risiko spesifik yang dihadapi oleh PHAM, dan ini berarti bahwa sistem itu sendiri akan sangat berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Panduan ini akan fokus pada bentuk SPD yang disebutkan dalam RAR, serta menyediakan sejumlah panduan umum tentang SPD.

SPD yang berupaya mencegah pelanggaran terhadap PHAM harus memiliki personil yang berpengalaman dan terlatih terkait risiko yang dihadapi oleh PHAM, memahami konteks di mana PHAM melaksanakan kegiatannya, faktor-faktor yang menimbulkan risiko dan meningkatkan serangan, serta cara yang tepat untuk mengatasi risiko tersebut.⁵⁴

Secara umum, fungsi SPD dibagi menjadi tiga fase yaitu pemantauan, analisis informasi (penilaian risiko), dan pemberitahuan.⁵⁵

Fase pemantauan adalah fase untuk mendeteksi potensi risiko, dan mencakup mengambil data dari lapangan, dari konteks di mana PHAM melaksanakan kegiatannya. Data yang didapatkan lalu dianalisis dan didaftarkan menurut kumpulan indikator yang ditetapkan sebelumnya kemudian dianalisis dan dilaporkan agar tindakan dapat diambil.⁵⁶

49 <https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/research/Pages/honduras-attach.aspx> Pasal 17

50 <https://protectioninternational.org/wp-content/uploads/2013/04/Best-Practices-and-Lessons-Learnt.pdf> hal. 51, 182, 192

51 <https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/2017-Roundtable-report-EN.pdf> hal. 9

52 https://www.oas.org/en/iachr/jsForm/?File=/en/iachr/media_center/preleases/2021/106.asp (hal. 14 dalam panduan)

53 <https://protectioninternational.org/wp-content/uploads/2013/04/Best-Practices-and-Lessons-Learnt.pdf> hal. 51, 182, 192; http://acuddeh.org/IMG/pdf/ini_lg_periodistas_y_defensores_de_ddhh-final.pdf Art. 99

54 https://www.oas.org/es/cidh/R/DDDH/Guias/GuiaPractica_DefensoresDDHH-v3_SPA.pdf hal. 25

55 https://www.oas.org/es/sap/pubs/GuiaAlerta_s.pdf hal. 16

56 https://www.oas.org/es/sap/pubs/GuiaAlerta_s.pdf hal. 30

Panduan praktis tentang fase pemantauan dan analisis dijelaskan dalam *Aksi Nasional 5.C*. Fase pemberitahuan dibahas di bawah. Begitu data dikumpulkan dan risiko diidentifikasi dan dianalisis, SPD juga harus memberitahu pemangku kepentingan yang relevan, khususnya pihak-pihak yang dapat melindungi PHAM yang terancam bahaya. Ini dapat mencakup otoritas nasional, regional, dan internasional. Jika dianggap sesuai, pemberitahuan tersebut dapat disampaikan secara publik.

Begitu tindakan telah diambil untuk meminimalkan risiko yang diidentifikasi, SPD harus menindaklanjutinya guna memastikan apakah langkah yang diambil benar-benar efektif. Jika kesepakatan tercapai di antara berbagai pihak, pastikan bahwa hal ini telah dipatuhi.⁵⁷ Jika risiko belum sepenuhnya reda, SPD dapat berkoordinasi dengan pihak yang berwenang terkait langkah baru apa yang harus diambil, atau mengambil langkah baru atas inisiatif sendiri.

i. Merespons pemberitahuan

Dalam kasus tertentu (misalnya saat SPD merupakan bagian dari mekanisme perlindungan dalam LNHAM), LNHAM mungkin memiliki kompetensi untuk merespons risiko tersebut.

Respons dapat berupa upaya untuk mencegah, mengontrol, memitigasi, atau menghilangkan risiko. Tiap aksi yang diambil harus dilakukan melalui konsultasi dan atas izin PHAM yang terpapar berisiko: dengan memperhatikan kebutuhan khusus PHAM, keluarganya, organisasi, dan komunitasnya.⁵⁸

Jika ini yang terjadi pada LNHAM Anda, Anda harus melakukan penilaian sebelumnya tentang cara Anda dalam menangani risiko,⁵⁹ dan memastikan adanya komunikasi yang jelas tentang langkah apa yang dapat Anda diberikan. Dengan begitu PHAM dapat mengelola ekspektasi dan melakukan penilaian keamanannya sendiri.⁶⁰

Beberapa cara untuk merespons risiko yang dihadapi oleh PHAM diantaranya:

- **Melaporkan pelanggaran:** Seperti dijelaskan lebih lanjut dalam Aksi Nasional 6, LNHAM dapat melaporkan pelanggaran terhadap PHAM, dengan mengaju ke kasus tertentu spesifik atau ke konteks umum, untuk memberi perhatian atas situasi mereka. Laporan dapat membantu kampanye advokasi atau litigasi di tingkat nasional, regional, dan internasional, dan dapat mencakup rekomendasi kepada pihak yang berwenang guna mencapai perubahan struktural.
- **Koordinasi:** SPD dapat berperan dalam mengoordinasikan intervensi oleh berbagai pihak untuk melindungi PHAM.⁶¹ Misalnya, dalam kasus konflik tanah, LNHAM dapat berperan dalam mencari perlindungan untuk masyarakat yang terdampak, memberitahu pemangku kepentingan nasional dan internasional tentang potensi pelanggaran HAM, serta menghubungi penerjemah dan mediator (perantara) yang peka terhadap budaya untuk memfasilitasi komunikasi dan meredakan ketegangan.⁶² Kerja sama dengan pasukan keamanan dan pelaksana pengadilan (penyelidik, jaksa) juga dapat bermanfaat.⁶³
- **Penyelidikan independen dan hak untuk mendapatkan keadilan:** Sejumlah LNHAM juga melakukan penyelidikan independen terhadap pelanggaran yang dialami oleh PHAM serta mendukung korban untuk mengambil jalur hukum.⁶⁴ Jika sesuai, hasil dari penyelidikan independen dapat diberikan kepada pihak yang berwenang yang menangani penuntutan.⁶⁵

57 https://www.dpe.gob.ec/rc2018/10.%20Ejecucion_programatica/7%20Prevenir%20vulneraciones%20DDHH%20a%20defensores%20y%20defensoras/Protocolo.pdf hal. 16

58 CIDH, Hacia una política integral de protección a personas defensoras de derechos humanos, OEA/Ser.L/V/II. Dok. 207/17, 29 Desember 2017, ayat 265.

59 <https://www.protectioninternational.org/wp-content/uploads/2013/04/Best-Practices-and-Lessons-Learnt.pdf>

60 <https://undocs.org/en/A/HRC/22/47> ayat 89

61 Baca, misalnya Narahubung OSCE untuk PHAM: <https://www.fidh.org/en/international-advocacy/other-regional-organisations/organization-for-security-and-cooperation-in-europe-osce/Focal-Point-on-Human-Rights>

62 <https://undocs.org/A/HRC/25/55> ayat 93, 94

63 https://www.oas.org/en/iachr/jsForm/?File=/en/iachr/media_center/preleases/2021/106.asp (hal. 24 dalam panduan)

64 <https://undocs.org/en/A/HRC/22/47> ayat 74

65 https://www.knchr.org/Portals/0/CivilAndPoliticalReports/Human%20Rights%20Defenders%20Policy%20and%20Action%20Plan_B5_L_22-1-18.pdf?ver=2018-06-06-191138-293 hal. 14 Langkah Kebijakan I.

- **Hibah darurat:** Bantuan finansial bersifat penting bagi PHAM untuk menghindari risiko. Hibah dapat diberikan untuk mendukung PHAM untuk menutupi pengeluaran penting, misalnya komunikasi yang aman, bantuan kemanusiaan, medis, hukum, perjalanan, relokasi, penggantian peralatan, transportasi, pemantauan, administrasi, kampanye advokasi, kegiatan pelatihan, atau penguatan kapasitas.⁶⁶
- **Respons tim cepat tanggap:** Dijelaskan dalam *sub-bagian D*, tim yang secara khusus dibentuk untuk menyediakan perlindungan mendesak dan segera dapat membantu meminimalkan risiko.
- **Langkah perlindungan:** Dalam konteks LNHAM, langkah perlindungan biasanya diberikan oleh mekanisme perlindungan yang dapat ditampung di dalam LNHAM,⁶⁷ LNHAM juga dapat membantu PHAM dalam meminta langkah perlindungan dari pihak berwenang lainnya yang memberikan perlindungan tersebut (misalnya lembaga HAM regional, atau mekanisme perlindungan yang terlepas dari LNHAM). Meskipun langkah-langkah ini bervariasi dalam konteks nasional, namun beberapa langkah umum yang dapat ditempuh diantaranya adalah: pendampingan protektif, kontak reguler, dan kunjungan ke PHAM, pemantauan uji coba, permohonan mendesak, pernyataan publik, hibah darurat, dan inisiatif relokasi.

Studi kasus mekanisme perlindungan:

Jika ada mekanisme perlindungan khusus, yakni pihak-pihak yang memberikan langkah protektif. Mekanisme Meksiko membagi langkah-langkahnya menjadi tiga bagian, yakni: langkah preventif, langkah perlindungan, dan langkah mendesak. Langkah-langkah ini diberikan kepada PHAM sesuai jenis dan urgensi dari risiko yang dihadapi.⁶⁸

- Langkah preventif mencakup: manual, kursus perlindungan diri individu dan kolektif, dan pendampingan pengamat dan jurnalis HAM.
- Langkah perlindungan mencakup: menyediakan sarana komunikasi yang aman (telepon, radio); pemasangan kamera, kunci, alarm, atau perangkat keamanan lainnya di tempat kerja atau di rumah-rumah PHAM; menyediakan mobil tahan peluru dan lapis baja.
- Langkah mendesak mencakup: evakuasi, relokasi sementara, pengawal pribadi, dan petugas keamanan.

C. Membentuk staf narahubung PHAM di LNHAM

Cara umum dan efektif untuk memasukkan SPD ke dalam tugas LNHAM Anda adalah melalui pembentukan Narahubung PHAM.

Narahubung PHAM merupakan bagian di dalam LNHAM (terdiri dari satu orang, sekelompok orang, atau badan tertentu) yang khusus menganalisis dan menangani promosi dan perlindungan hak-hak PHAM.⁶⁹

Fungsi narahubung sangat bervariasi, beberapa diantaranya adalah:

- Pemantauan situasi PHAM, termasuk risiko terhadap keamanan mereka, serta hambatan hukum dan lainnya dalam mewujudkan dan mempertahankan lingkungan yang aman dan kondusif untuk pekerjaan mereka.⁷⁰

66 <https://freedomhouse.org/programs/emergency-assistance-and-thematic-programs/lifeline-embattled-cso-assistance-fund>

67 <https://undocs.org/A/HRC/31/55> ayat 65, 95

68 http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_mex_ane_12.pdf Pasal 32-34

69 <https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/document/Lorion%20Defining%20GHRFPs%20-%20DIHR%202021%20Final.pdf> hal. 5

70 <https://undocs.org/A/HRC/25/55> ayat 80

- Mengarusutamakan standar tentang perlindungan PHAM serta mengoordinasikan aksi diantara berbagai bagian dalam LNHAM terkait promosi dan perlindungan PHAM.⁷¹
- Mengelola sistem penanganan aduan.

Beberapa contoh narahubung untuk PHAM adalah LNHAM di India⁷² dan Uganda.⁷³ Antara lain, narahubung Uganda meninjau RUU terkait PHAM, menyampaikan masukan LNHAM terkait masalah tersebut.⁷⁴

Studi Kasus:

LNHAM di Azerbaijan, Denmark, dan Portugal telah mengembangkan narahubung untuk penduduk yang rentan, termasuk anak-anak dan lansia. Narahubung Portugal menyediakan bantuan khusus melalui saluran bantuan khusus, yang menyediakan informasi, mengarahkan pengguna ke pihak yang berwenang, menjalin kontak langsung dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak warga negara dihormati, dan menindaklanjuti situasinya.⁷⁵

Seperti halnya mekanisme apa pun yang terkait dengan PHAM, mekanisme ini harus responsif dengan konteks nasional dan dikembangkan melalui konsultasi dengan PHAM di tingkat nasional. Mekanisme ini tidak boleh bekerja terpisah dari narahubung untuk hal lain, atau untuk tugas yang lebih luas di LNHAM Anda. Pendekatan interseksional terhadap perlindungan PHAM sangat penting, dengan mempertimbangkan berbagai elemen kerentanan, seperti gender, ras, dan etnis.

Beberapa potensi elemen dari narahubung PHAM diantaranya adalah:

- Mandat untuk melindungi dan memajukan hak-hak PHAM.
- Personel dengan pengalaman yang relevan dan pemahaman tentang hak-hak PHAM, terlatih untuk hak-hak PHAM, risiko, dan tantangannya, serta untuk cara menyelidiki pelanggaran.⁷⁶ "Program peningkatan kapasitas untuk PHAM" yang dijalankan oleh APF merupakan contoh dari pelatihan tersebut.⁷⁷
- Beberapa saluran komunikasi dengan PHAM, yang mencakup saluran siaga nasional, seperti yang dibahas lebih lanjut pada *sub-bagian E* di bawah.
- Pemenuhan beberapa fungsi SPD dan/atau mekanisme perlindungan (baca *sub-bagian G* di bawah ini). Misalnya memantau situasi PHAM, serta memberitahu pemangku kepentingan terkait dan merespons risiko.

D. Mengembangkan dan menyediakan tim cepat tanggap

Tim cepat tanggap dapat merespons ancaman dengan cepat, dan memberi perlindungan segera kepada PHAM. Idealnya, tim cepat tanggap bersifat fleksibel sehingga dapat memberikan respons cepat terhadap peristiwa yang tak terduga.

71 <https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/document/Lorion%20Defining%20GHRFPs%20-%20DIHR%202021%20Final.pdf> hal. 57

72 <https://hrcnet.nic.in/HRCNet/public/NHRCStatisticsList.aspx?Statistics=HRDAll>

73 <https://www.uhrc.ug/about/administrative-structure/>

74 <https://undocs.org/en/A/HRC/22/47> ayat 92

75 <https://ganhri.org/wp-content/uploads/2019/12/GANHRI-UNICEF-Children%E2%80%99s-Rights-in-National-Human-Rights-Institutions.pdf> hal. 38, 39

76 <https://ganhri.org/wp-content/uploads/2019/12/GANHRI-UNICEF-Children%E2%80%99s-Rights-in-National-Human-Rights-Institutions.pdf> hal. 43

77 <https://community.asiapacificforum.net/>

Saat tim mendeteksi ancaman yang akan terjadi, tim ini harus meresponsnya secepat mungkin, idealnya tidak lebih dari 48 jam. Ini berarti tim harus memiliki sarana yang cukup dan siap digunakan kapan pun (kontak dengan pihak terkait yang berwenang, dana) untuk memberikan respons yang memadai.

Studi Kasus:

LNHAM India memiliki bentuk tim cepat tanggap yang dinamai 'Rapid Action Cell' (RAC), yang menangani kasus mendesak. Fungsinya mencakup: berbicara dengan pihak berwenang/pembuat aduan melalui telepon untuk memastikan fakta, mengirimkan aduan melalui faks ke berbagai pihak berwenang sebagai acuan dan meminta mereka untuk segera mengirimkan balasan.⁷⁸

Mekanisme Perlindungan PHAM Meksiko juga memiliki tim cepat tanggap.⁷⁹ Mandatnya menyebutkan "jika nyawa atau integritas fisik PHAM atau keluarganya terancam bahaya yang akan segera terjadi, tim Reaksi Cepat akan memberikan, dalam waktu 3 jam, langkah perlindungan mendesak, yang akan diterapkan selambat-lambatnya dalam 9 jam. Secara bersamaan, studi Evaluasi Tindakan Langsung akan dilakukan. Setelah siap, filenya dikirim ke Koordinator eksekutif agar prosesnya dapat berlanjut melalui cara biasa.'

E. Menyiapkan saluran siaga nasional dan saluran komunikasi lainnya untuk PHAM yang terancam bahaya

Saluran nasional khusus yang dapat dihubungi oleh PHAM dan kenalan mereka jika terdapat masalah atau situasi darurat yang sifatnya genting untuk memberikan respons mendesak. Saluran siaga harus bebas biaya, beroperasi setiap saat, serta tersedia dalam beberapa bahasa. Salah satu contoh yang baik dari saluran siaga internasional yaitu saluran siaga Front Line Defenders.⁸⁰

Selain itu, sarana untuk berkomunikasi dengan LNHAM harus terbuka dan beragam, termasuk misalnya: secara tatap muka, panggilan melalui telepon atau internet, SMS atau pengiriman pesan instan, komunikasi daring, aplikasi digital, atau melalui surat-menyurat dan bentuk komunikasi fisik lainnya.⁸¹ Seperti disebutkan *di atas* (dan lebih lanjut dijelaskan dalam *Aksi Nasional 5*), keamanan PHAM harus diprioritaskan, artinya protokol keamanan digital harus diikuti dan semua informasi sensitif harus dilindungi.

F. Program relokasi dan jeda istirahat nasional

Program relokasi dan jeda istirahat merupakan salah satu langkah paling efektif dan kompleks untuk melindungi PHAM. Tujuannya adalah memindahkan PHAM dari wilayah yang memberi bahaya langsung serta menempatkan mereka di wilayah di mana mereka dapat beristirahat dan mengambil jeda. Relokasi harus bersifat sementara dan dapat bersifat nasional (mis. rumah aman/safe house, penampungan oleh relawan, atau pindah ke kota lain), atau bersifat internasional. Apabila kembali ke rumah tidak memungkinkan, maka suaka merupakan opsi yang lebih baik.

Logistik dan kompleksitas relokasi orang yang terancam bahaya menunjukkan pentingnya LNHAM untuk memiliki protokol, prosedur, dan kontak yang dapat dihubungi.⁸² LNHAM Anda juga dapat mendukung pembela HAM dengan memfasilitasi kontak dengan organisasi nasional dan internasional yang menyediakan penampungan atau rumah sementara.

78 https://nhrc.nic.in/about-us/organization-structures/specialized_divisions_and_staff

79 http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_mex_ane_12.pdf pasal 26

80 <https://www.frontlinedefenders.org/en/emergency-support>

81 www.dpe.gob.ec/rc2018/10.%20Ejecucion_programatica/7%20Prevenir%20vulneraciones%20DDHH%20a%20defensores%20y%20defensoras/Protocolo.pdf hal.19;
<https://rspo.org/about/contact/hrd-hotline-eng>

82 <https://undocs.org/A/HRC/31/55> ayat 72-75

Untuk relokasi internasional, LNHAM Anda dapat mendukung PHAM dengan menyediakan bantuan hukum guna mendapatkan semua dokumen perjalanan yang diperlukan atau mengajukan permohonan suaka. Koordinasi dengan LNHAM lainnya (mis. anggota APF) dapat memfasilitasi relokasi internasional, misalnya dengan mengusulkan perjanjian internasional tentang penerbitan visa atau izin tinggal bagi PHAM yang ingin direlokasi.

G. Mekanisme perlindungan khusus

Mekanisme perlindungan adalah sistem yang dirancang untuk melindungi nyawa, kesejahteraan, dan keselamatan PHAM yang terancam bahaya akibat kegiatan politik, publik, sosial, atau kemanusiaan. Mereka dapat menjadi bagian dari infrastruktur pemerintah atau bersifat independen.⁸³ Mereka menawari lembaga terpusat untuk memantau dan melaporkan situasi tentang PHAM dan mengoordinasikan respons terhadap ancaman.⁸⁴

PHAM UNSR merekomendasikan agar *“program perlindungan harus memiliki sistem peringatan dini guna mengantisipasi dan memicu pelaksanaan tindakan yang protektif. Selain itu juga harus menilai keamanan anggota keluarga dan kerabat pembela HAM.”*⁸⁵

Model Hukum ISHR diantaranya menyebutkan bahwa mekanisme perlindungan harus:⁸⁶

- Berupaya mengidentifikasi dan menangani faktor struktural dan sistemik yang berkontribusi terhadap risiko serta memungkinkan penilaian individu untuk PHAM tertentu.
- Memiliki langkah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi PHAM, berkontribusi terhadap pencegahan ancaman, risiko, dan pengekangan terhadap PHAM, serta menyediakan perlindungan mendesak dan jangka lebih panjang bagi PHAM yang terancam bahaya.
- Membantu, menolong, dan meminta penyelidikan untuk mengadili pelanggaran terhadap PHAM.
- Mensosialisasikan informasi tentang pentingnya pekerjaan yang dilakukan oleh PHAM dan tentang Deklarasi PBB tentang PHAM.

Sejumlah LNHAM juga berperan sebagai mekanisme perlindungan untuk PHAM. Baru-baru ini, mekanisme tersebut telah dikembangkan di beberapa negara di Afrika Barat. Penelitian terbaru tentang mekanisme ini di Afrika Barat menguraikan sejumlah pembenahan untuk meningkatkan efektivitasnya. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa jika LNHAM ingin berperan sebagai mekanisme perlindungan, sebagai tambahan dari elemen yang disebutkan di atas, LNHAM harus:⁸⁷

- Memiliki mandat tertentu untuk berkonsultasi dengan masyarakat sipil tentang pengembangan, pembentukan, dan implementasi mekanisme perlindungan untuk PHAM.
- Dibekali dengan dana yang memadai, yang dialokasikan untuk tujuan tertentu, dan berasal dari sumber independen untuk menjalankan mandat mekanisme perlindungan khusus untuk PHAM.
- Memiliki fungsi preventif serta mampu mengomentari RUU dan kebijakan publik yang terkait dengan PHAM.
- Diberdayakan untuk menjalankan dan melaksanakan langkah-langkah perlindungan dan arahan yang konkret melalui kerjasama erat dengan badan keamanan dan peradilan di dalam negeri.
- Diberi mandat untuk memeriksa dan melatih staf dan personel dengan semestinya yang terlibat dalam implementasi mekanisme perlindungan.
- Terlibat sejak awal dalam pengembangan UU PHAM.
- Menduduki posisi dalam LNHAM yang mematuhi Prinsip-Prinsip Paris.

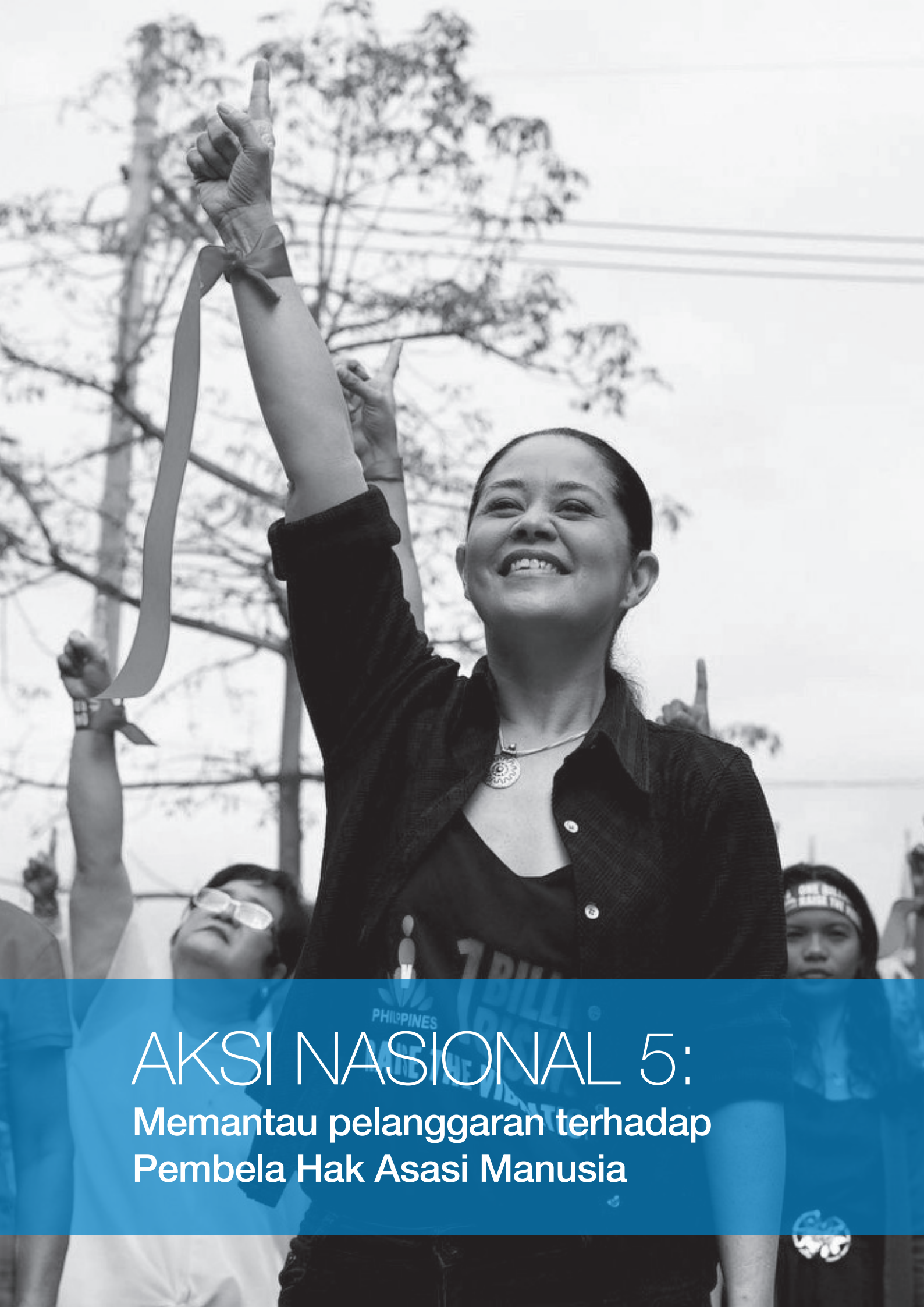
83 <https://undocs.org/A/HRC/13/22> ayat 81, 84

84 <https://undocs.org/A/HRC/31/55> ayat 93

85 <https://undocs.org/A/HRC/25/55> ayat 88

86 https://ishr.ch/wp-content/uploads/2021/04/05_jan2017_english_model_law_all.pdf Bab IV. Bagian 34-37

87 <https://ishr.ch/defenders-toolbox/resources/nhri-ishr-launches-research-potential-national-human-rights-institutions-serve-protection/> hal. 21



AKSI NASIONAL 5:

Memantau pelanggaran terhadap
Pembela Hak Asasi Manusia



LNHAM dalam posisi yang unik untuk mengumpulkan informasi tentang hak-hak PHAM.⁸⁸ Dewan HAM PBB telah mengakui nilai-nilai dari pemantauan dan rekomendasi mereka terhadap undang-undang yang sudah ada dan yang diusulkan, khususnya yang berkaitan dengan dampaknya terhadap kegiatan PHAM (seperti yang dibahas sebelumnya dalam *Aksi Nasional 1*).⁸⁹

Pemantauan dapat mencakup fokus pada pengalaman hidup PHAM di dalam negeri, termasuk dengan menyelidiki pelanggaran terhadap hak-hak. Pemantauan dapat memberikan hasil langsung dan jangka panjang, baik dengan membantu korban untuk mendapatkan kompensasi serta dengan memicu penyelidikan dan penyidikan yang lebih luas, yang dapat mengidentifikasi pola pelanggaran yang sistematis.

Data yang dipisahkan dan disesuaikan dengan konteks dapat membantu untuk:

- Memastikan bahwa materi, kebijakan, dan advokasi untuk PHAM ditargetkan secara efektif dan bersifat responsif.⁹⁰
- Menunjukkan PHAM yang paling terancam bahaya dan membutuhkan dukungan, serta langkah perlindungan apa yang memiliki dampak aktual.⁹¹
- Memastikan pertanggungjawaban untuk pelanggaran terhadap HAM, karena dapat membantu dalam mengidentifikasi akar masalah penyebab agresi dan manifestasi umum lainnya, sebagai PHAM dan area yang paling terdampak.⁹²

Hal tersebut di atas berarti bahwa LNHAM dapat menjadi aktor penting dalam perjuangan melawan impunitas.⁹³

Dengan mendapatkan data melalui serangkaian indikator yang disepakati di tingkat regional, maka statistik regional juga dapat dikembangkan. Dalam hal ini, APF dapat mendukung anggotanya dengan bantuan teknis yang diperlukan untuk membuat pengumpulan dan analisis data yang efektif, serta mendukung pengembangan kerangka kerja untuk statistik nasional dan regional.

A. Peraturan penting tentang pengumpulan data

i. Menyertakan PHAM sebagai prioritas khusus dalam Rencana Strategis

Mempertimbangkan peran besar PHAM dalam memajukan penegakan HAM yang efektif oleh semua, perlindungan dan promosi PHAM dan pekerjaannya harus menjadi prioritas LNHAM, dan LNHAM harus mempertimbangkan hal ini saat mengembangkan rencana strategisnya.

PHAM dapat diklasifikasikan sebagai prioritas khusus dalam rencana strategis Anda, yang akan memastikan bahwa sumber daya dan waktu didedikasikan untuk melindungi mereka. Penetapan prioritas ini akan diserahkan kepada setiap LNHAM, berdasarkan kebutuhan khusus PHAM di negara mereka, dan seperti biasa, dikembangkan melalui konsultasi dengan PHAM. Ini juga dapat didukung oleh APF.

Jika ada masalah yang mendesak untuk PHAM di negara tertentu, prioritasnya harus mencerminkan hal ini, misalnya jika terdapat proyek industri ekstraksi yang melanggar hak-hak PHAM masyarakat adat, atau jika kelompok PHAM tertentu dikriminalisasi akibat pekerjaannya.

ii. Pengelolaan informasi yang aman dari PHAM

Seperti yang disebutkan pada awal Panduan ini, salah satu elemen lintas sektor saat menangani informasi terkait PHAM adalah memastikan informasi tersebut tetap aman dan memprioritaskan keamanan PHAM. Ini sangat penting saat memantau dan juga melaporkan (baca *Aksi Nasional 6*) pelanggaran terhadap PHAM.

Sejumlah PHAM memilih tidak melaporkan pelanggaran terhadap hak-hak mereka karena takut akan tindakan pembalasan. Ini umumnya terjadi pada kasus pelanggaran yang dilakukan oleh agen Negara.⁹⁴ Dalam hal ini, tidak ada informasi yang dapat diidentifikasi tentang PHAM atau pelanggaran yang harus

88 <https://undocs.org/en/A/HRC/22/47> ayat 23, 72

89 <https://www.right-docs.org/doc/a-hrc-res-22-6/> ayat 16, 17

90 RAR halaman 22

91 https://www.oas.org/en/iachr/jsForm/?File=/en/iachr/media_center/preleases/2021/106.asp (hal. 18 dalam panduan)

92 https://ganhri.org/wp-content/uploads/2019/10/DIMR_GANHRI-CSW-Report_final-BF.pdf hal. 14, 35

93 <https://undocs.org/en/A/HRC/22/47> ayat 24

94 <https://undocs.org/en/A/74/159> ayat 56-58

diungkapkan kecuali diizinkan oleh mereka, atau rekan mereka. Misalnya, saat LNHAM Afrika Selatan mewawancarai PHAM dan orang yang bekerja dengan mereka untuk meminta laporan tentang situasi PHAM nasional, tidak ada kutipan langsung disebutkan.⁹⁵

Protokol dan praktik keamanan digital harus dikembangkan untuk memastikan identitas pembela HAM dan keluarganya dilindungi dan tidak ada data pribadi yang dibagikan. Data yang berisi informasi PHAM atau pelanggaran yang dialami dapat disimpan di lokasi yang aman (baik fisik maupun digital)⁹⁶ dan, sebagai tindakan pencegahan tambahan, LNHAM Anda dapat mengelompokkan kasus berdasarkan angka, bukan berdasarkan nama PHAM, dengan nama orang yang bersangkutan disimpan secara terpisah.⁹⁷

Untuk informasi selengkapnya, termasuk tentang penyimpanan data yang aman, baca *Pemantauan, Evaluasi, Akuntabilitas, dan Pembelajaran APF: Panduan untuk Lembaga Nasional HAM*.⁹⁸

LNHAM Argentina serta kantor Kejaksaan Guatemala memberikan contoh yang bagus tentang cara mencatat informasi anonim tentang pelanggaran HAM.⁹⁹ Keduanya mengumpulkan dan mempublikasikan data statistik tentang kekerasan terhadap perempuan, sembari menjaga anonimitas identitas korban serta kekhususan kasus.¹⁰⁰ Mekanisme perlindungan Brasil memuat basis data untuk mendata pembela HAM yang terancam bahaya.¹⁰¹

Penanganan informasi yang aman akan mendorong lebih banyak PHAM untuk datang dan mengungkapkan pelanggaran. Ini akan menjadikan sistemnya lebih efisien dan meningkatkan dampak terhadap kondisi PHAM di negara Anda.

iii. Pemilahan data

Semua informasi yang dikumpulkan harus dipisahkan menurut beberapa elemen seperti ras, gender, usia, jenis pekerjaan HAM, jenis pelanggaran, tanggal dan waktu, serta kemungkinan pelaku. Informasi ini akan membantu LNHAM Anda memahami skala isu, mengadopsi aksi preventif dan investigatif saat diperlukan, dan mengidentifikasi kasus serupa yang dapat menunjukkan pola atau organisasi kriminal.¹⁰² Lihat *Aksi Nasional 2* untuk informasi selengkapnya tentang *pemilahan data menurut gender*.

Pemilahan data juga akan membantu untuk menunjukkan faktor-faktor lain, misalnya fakta bahwa sejumlah kelompok tidak menyampaikan aduan mungkin bukan karena mereka tidak mengalami pelanggaran, namun lebih karena elemen lainnya yang mencegah mereka untuk menghubungi LNHAM. Misalnya, penelitian tentang hak anak-anak di LNHAM mempertimbangkan bahwa sejumlah anak memilih untuk tidak mengungkapkan pelanggaran terhadap hak-hak mereka karena tidak memadainya infrastruktur digital untuk telepon atau saluran bantuan daring yang mudah diakses, bukan karena tidak terjadinya pelanggaran.¹⁰³

95 <https://www.sahrc.org.za/home/21/files/Human%20Rights%20Defenders%20Publication.pdf> halaman. 10

96 <https://www.asiapacificforum.net/resources/monitoring-evaluation-accountability-and-learning-guide-national-human-rights-institutions/> hal. 65

97 [asiapacificforum.net/resources/preventing-torture-operational-manual-national-human-rights-institutions/](https://www.asiapacificforum.net/resources/preventing-torture-operational-manual-national-human-rights-institutions/) hal. 41

98 <https://www.asiapacificforum.net/resources/monitoring-evaluation-accountability-and-learning-guide-national-human-rights-institutions/>

99 <http://observatorio.mp.gob.gt/>

100 Observatorio de Femicidios de la *Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina*

101 <https://undocs.org/A/HRC/13/22> ayat 79

102 <https://undocs.org/en/A/74/159> ayat 60

103 [ganhri.org/wp-content/uploads/2019/12/GANHRI-UNICEF-Children%E2%80%99s-Rights-in-National-Human-Rights-Institutions.pdf](https://www.ganhri.org/wp-content/uploads/2019/12/GANHRI-UNICEF-Children%E2%80%99s-Rights-in-National-Human-Rights-Institutions.pdf) hal. 29

B. Mengidentifikasi PHAM dalam sistem penanganan aduan

Jika LNHAM Anda memiliki sistem penanganan aduan, sistem ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data tentang pelanggaran HAM secara umum. Misalnya, LNHAM Bosnia dan Herzegovina dan Nigeria memiliki daftar aduan untuk kekerasan berbasis gender.¹⁰⁴

Prosedur untuk mengidentifikasi PHAM, termasuk opsi untuk identifikasi atau identifikasi diri dalam sistem penanganan aduan yang sudah ada, akan memudahkan LNHAM untuk memperoleh informasi tentang pelanggaran terhadap PHAM dalam arsitektur yang ada. Sepertinya tidak semua PHAM akan bersedia membuka identitasnya seperti itu sehingga penting juga untuk menyimpulkan dari informasi yang diberikan melalui sistem penanganan aduan apakah korban termasuk ke dalam definisi PHAM yang luas.¹⁰⁵

Jika LNHAM Anda tidak memiliki sistem penanganan aduan, pengumpulan data dapat dilakukan melalui cara lain seperti dalam meneliti laporan, melalui saluran siaga darurat, atau petugas penghubung langsung lainnya.

C. Memantau implementasi pemerintah terhadap Deklarasi PHAM tahun 1998

LNHAM dapat membantu Negara-negara dalam menjadikan undang-undang dan penerapannya sesuai standar internasional. Misalnya, LNHAM Maroko telah menetapkan mekanisme khusus untuk memantau perwujudan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di negara tersebut.¹⁰⁶

LNHAM didorong untuk mendukung pemerintah dalam mematuhi standar internasional tentang perlindungan PHAM, termasuk Deklarasi PBB tentang pembela HAM.¹⁰⁷ LSM dan LNHAM menyediakan contoh yang berguna tentang cara melaksanakan pemantauan ini secara efektif.

Dalam laporannya tentang status PHAM di dalam negeri, LNHAM Afrika Selatan (“SAHRC”) mendedikasikan suatu bagian terkait ‘Memantau kewajiban internasional dan regional terkait PHAM di Afrika Selatan’. Lembaga ini memantau kepatuhan dengan memverifikasi isi laporan dan rekomendasi dari lembaga internasional hak asasi manusia. Selain pemantauan khusus untuk implementasi unsur-unsur dalam Deklarasi PHAM, karena hak-hak yang terkandung di dalamnya mengungkapkan hak dalam instrumen internasional utama (yakni kebebasan berekspresi, kemerdekaan, pekerjaan), pengamatan badan traktat PBB juga dapat berperan dalam menentukan kepatuhan terhadap Deklarasi PHAM.¹⁰⁸

APF berupaya mendukung LNHAM untuk memastikan bahwa sarana pembanding untuk memantau implementasi Deklarasinya serupa antara anggota LNHAM sehingga perbandingan regional juga dapat dilakukan.

Studi Kasus:

Pada tahun 2018, ISHR bersama dengan Colombian Commission of Jurists (CCJ) dan Tunisian Human Rights League (LTDH) melakukan penelitian tentang apakah Deklarasi PBB tentang PHAM telah membawa perbedaan dalam kehidupan PHAM di Kolombia dan Tunisia. Metodologi yang digunakan oleh penelitian tersebut juga dapat memberikan panduan yang bermanfaat tentang sarana untuk memantau implementasi Deklarasi PHAM. Beberapa langkahnya mencakup:¹⁰⁹

- Menganalisis situasi di lapangan.

104 https://ganhri.org/wp-content/uploads/2019/10/DIMR_GANHRI-CSW-Report_final-BF.pdf hal. 15

105 Yakni, siapa pun yang menganjurkan dan memperjuangkan “perlindungan dan perwujudan HAM dan kebebasan fundamental di tingkat nasional dan internasional.” <https://undocs.org/A/RES/53/144>

106 <https://ganhri.org/wp-content/uploads/2019/12/GANHRI-UNICEF-Children%E2%80%99s-Rights-in-National-Human-Rights-Institutions.pdf> hal. 25

107 <https://www.right-docs.org/doc/a-hrc-res-22-6/> ayat 20, 21

108 <https://www.sahrc.org.za/home/21/files/Human%20Rights%20Defenders%20Publication.pdf> hal 14

109 <https://ishr.ch/defenders-toolbox/resources/has-the-un-declaration-made-a-difference-to-the-lives-of-human-rights-defenders/>

- Pertemuan dengan perwakilan Negara-negara, Pejabat PBB, dan aktor masyarakat sipil untuk membahas dan menganalisis prosedur dan praktik yang digunakan untuk menerapkan resolusi dan rekomendasi PBB terkait PHAM.
- Menganalisis laporan hak asasi manusia dari pakar, lembaga, dan organisasi hak asasi manusia. Laporan yang bermanfaat dapat berasal dari Badan Traktat PBB, Pelapor Khusus (khususnya UNSR tentang PHAM), organisasi regional serta LSM lokal dan internasional (seperti Amnesty International dan Protection International).
- Meninjau suara dan partisipasi pemerintah dalam negosiasi dan resolusi terkait PHAM dalam badan HAM (seperti Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Majelis Umum PBB). Pendekatan serupa juga diambil oleh SAHRC, yang meninjau suara Pemerintah Afrika Selatan dalam Resolusi PBB terkait PHAM.
- Meninjau sosialisasi standar internasional dan keberadaan (atau ketiadaan) basis data di mana publik dapat meninjau dan memantau rekomendasi dan resolusi PBB.
- Menganalisis pidato dan pernyataan pejabat politik untuk menentukan kemauan politik dan sentimen publik.
- Menganalisis kasus kriminalisasi dan keputusan pengadilan dan politik lainnya.
- Meninjau kerangka kerja legislatif.
- Meninjau persyaratan, kemampuan, dan efektivitas pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam memantau, melaporkan, dan memastikan implementasi standar-standar internasional. Ini mencakup meninjau kompetensi, sumber daya, dan hasil.
- Memverifikasi adanya arahan dan undang-undang yang dirancang untuk mematuhi persyaratan Deklarasi.

D. Mengumpulkan data yang dipilih tentang pelanggaran dari jaringan PHAM dan sumber komunitas lainnya

Berulang kali ditegaskan di seluruh Panduan ini bahwa informasi tentang pelanggaran hak-hak PHAM bersifat fundamental untuk perlindungan mereka, dan prosedur untuk mengumpulkan data tersebut juga penting.

Untuk memulai, ada baiknya untuk mengembangkan prinsip-prinsip pemandu penyelidikan yang dapat mencakup unsur-unsur, seperti:¹¹⁰

- Pembelaan hak asasi manusia merupakan unsur penting dalam strategi investigatif;
- Penyelidikan harus untuk menentukan tingkat tanggung jawab dan hukuman yang sepadan;
- Pendekatan interseksional;
- Melibatkan analisis kontekstual dan faktor risiko;
- Mengadopsi metode penyelidikan yang mencerminkan kompleksitas pelanggaran; dan
- Berupaya membuktikan bahaya dan berujung pada pemulihan hak.

i. Data yang akan dikumpulkan

Data yang akan dikumpulkan harus dimuat dalam format standar yang mengikuti kumpulan indikator yang telah ditetapkan. Ini akan memungkinkan pemeriksaan silang antara berbagai kasus dan membuat pola pelanggaran terhadap PHAM.¹¹¹ Ini, nantinya, memungkinkan penentuan risiko spesifik dan konsekuensinya yang serius. Format dan indikatornya harus dijelaskan melalui kolaborasi erat dengan semua anggota APF - dan dengan panduan APF - sehingga metriknya memungkinkan adanya perbandingan regional akhir melalui basis data regional terencana yang akan diterapkan oleh APF ke depannya.¹¹²

¹¹⁰ <https://undocs.org/en/A/74/159> 87-128

¹¹¹ asiapacificforum.net/resources/preventing-torture-operational-manual-national-human-rights-institutions/ hal. 41

¹¹² RAR halaman 22

Data yang dikumpulkan dapat merupakan dan menyoroti:¹¹³

Penyebab serangan terhadap PHAM:¹¹⁴	Penyebab struktural: variabel yang mengakar kuat dan berkembang dari waktu ke waktu yang dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran.¹¹⁵ Ini termasuk: • Lingkungan politik; kemauan politik, transparansi, penghormatan terhadap konsep negara hukum (rule of law), tingkat korupsi dan impunitas, efisiensi. Kejahatan tingkat tinggi dan kekerasan bersenjata, atau perampasan lahan, wilayah, dan sumber daya masyarakat adat. • Kerangka kerja hukum: pengakuan PHAM dalam undang-undang, larangan pelanggaran khusus terhadap hak-hak mereka, mekanisme perlindungan yang tersedia. • Lingkungan kelembagaan: berfungsinya lembaga hukum, independensi dan ketidakberpihakan peradilan, berfungsinya dan pelatihan pasukan Negara, tingkat tanggungjawab dan transparansi pihak yang berwenang, eksistensi, dan kemampuan untuk beroperasi secara terpisah dari aktor lainnya. • Lingkungan masyarakat dan budaya: sikap terhadap PHAM, diskriminasi, stereotipe, stigmatisasi, perubahan demografi, faktor ekonomi. Penyebab terdekat: variabel tidak langsung yang secara bertahap menyebabkan pelanggaran. Ini mencakup peristiwa yang menarik perhatian internasional (pemilu, olahraga) jika PHAM dibungkam. Situasi konflik. Penyebab pemicu: peristiwa yang secara langsung berujung pada pelanggaran.¹¹⁶ Misalnya, saat PHAM mengungkap pelanggaran atau melakukan kegiatan (mis. unjuk rasa terbuka), terkait pelanggaran
Sifat pelanggaran:	Umum: saat pelanggaran menggambarkan potensi bahaya yang luas untuk salah satu atau semua PHAM (mis. pengadopsian undang-undang yang mengekang), pelanggaran tersebut merupakan bagian dari pelanggaran struktural (mis. tingginya tingkat pelanggaran dan/atau impunitas) atau saat pelanggaran tersebut merupakan bagian dari pola sistemik (mis. permusuhan sosial terhadap PHAM). Spesifik: Di satu sisi, kepura-puraan akan bersifat spesifik saat dapat membuktikan bahwa bahaya sebenarnya menimpa pembela HAM individu (mis. serangan atau proses kriminalisasi). Bahaya harusnya dianggap ditimbulkan saat salah satu hak PHAM yang diuraikan dalam Model Hukum di atas telah dilanggar.¹¹⁷

113 https://www.oas.org/en/iachr/jsForm/?File=/en/iachr/media_center/preleases/2021/106.asp (hal. 15, 27 dalam panduan) https://www.dpe.gob.ec/rc2018/10.%20Ejecucion_programatica/7%20Prevenir%20vulneraciones%20DDHH%20a%20defensores%20y%20defensoras/Protocolo.pdf hal. 12, 13

114 https://www.oas.org/es/sap/pubs/GuiaAlerta_s.pdf hal. 40, 41

115 https://ganhri.org/wp-content/uploads/2019/11/Torture_Prevention_Guide.pdf halaman. 3; <https://undocs.org/en/A/HRC/46/35> ayat 30

116 <https://undocs.org/A/HRC/13/22> ayat 52-61

117 Model Hukum, halaman ii

Dinamika kekerasan terhadap PHAM, diantaranya:	Perubahan/jangka waktu ‘musiman’ saat PHAM cenderung terancam bahaya. ¹¹⁸
	Cara-cara yang diketahui dalam melakukan kekerasan: karakteristik, frekuensi, intensitas, orang yang terlibat.
	Motif pelaku: kebutuhan ekonomi, kepentingan yang bertentangan dengan PHAM, dinamika kekuatan (gender, budaya, ras).
	Sifat ancaman: tersirat atau tersurat, individu atau kolektif, sesuai konteks atau tidak, langsung, tidak langsung atau umum, langsung (tatap muka) atau dari jarak jauh. ¹¹⁹ Catatan: Definisi dari digolongkan sebagai ancaman harus diperluas agar mencerminkan berbagai jenis ancaman yang dapat dihadapi oleh PHAM.
Karakteristik orang yang terlibat:	Pada korban: antara lain usia, status sosial ekonomi, lokasi geografi, gender, identitas gender, orientasi seksual, ras, etnis, jenis pekerjaan HAM, kapasitas untuk menghindari risiko (edukasi, pertahanan diri). Juga merupakan risiko jika langkah protektif tidak diberikan.
	Pada penyerang: identitas dan profesi (pelaku negara/non-negara), ancaman dan tindakan yang dilakukan, keahlian dan sumber daya untuk bergerak, agresi sebelumnya, tingkat pengaruh. Membedakan antara orang yang membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan (intellectual author) dan orang yang melakukan kejahatan (material author).
	Pada orang yang bertanggung jawab untuk melindungi: kesediaan, kapasitas, efektivitas, ketekunan, sumber daya, pengaruh.

ii. Pengumpulan data

Ketika kerangka kerja dan indikator untuk pengumpulan datanya disepakati, datanya dapat dikumpulkan. Seperti halnya dalam elemen lainnya dalam Panduan ini, sumber informasi utama harus dari PHAM itu sendiri karena mereka paling ideal untuk membagikan pengalaman hidupnya. ‘Sumber utama’ lainnya mencakup pengamat dan mereka yang terlibat langsung dengan PHAM (kenalan, anggota keluarga, jaringan, OMS lainnya) karena mereka dapat memberikan kesaksian langsung yang bermanfaat tentang pengalaman PHAM.¹²⁰

Cara pengumpulan data lainnya dapat mencakup laporan dan kiriman LSM serta dengar pendapat terbuka, yang memungkinkan beberapa pihak untuk menyediakan informasi tentang isu-isu yang relevan.¹²¹ Misalnya, Komisi HAM Antar-Amerika melakukan dengar pendapat terbuka tentang situasi HAM di berbagai negara, yang dapat digunakan PHAM untuk mengungkap pelanggaran dan rintangan terhadap pekerjaan mereka.¹²² Ini akan memudahkan perolehan data secara “pasif” (yakni, data yang Anda dapatkan tanpa harus mencarinya secara aktif, tetapi lebih karena diberikan oleh orang lain, misalnya PHAM atau kenalan, biasanya melalui aduan).

¹¹⁸ E/CN.4/2003/104, ayat 23.

¹¹⁹ <https://undocs.org/en/A/HRC/46/35> ayat 53-55, 63

¹²⁰ https://www.oas.org/es/sap/pubs/GuiaAlerta_s.pdf hal. 36, 37

¹²¹ <https://ganhri.org/wp-content/uploads/2019/10/English-Mapping-Survey-on-Complaints-Haldling-Systems-Final.pdf> hal. 24

¹²² COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Venezuela: Niñez y crisis. 163 Período Extraordinario de Sesiones de la CIDH. *Venezuela: Niñez y crisis*

Meski demikian, Anda harus mengambil sikap proaktif dan berupaya mencari data, misalnya dengan secara langsung menghubungi PHAM atau kenalan mereka, atau dengan melakukan penyelidikan, survei, atau kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan melalui sistem penanganan aduan, Narahubung PHAM, dan saluran siaga nasional.¹²³ Pemantauan yang dititikberatkan pada peristiwa publik yang spesifik seperti pemilu atau sidang pengadilan yang dapat membuat PHAM lebih rentan juga bisa berguna.¹²⁴

Dalam hal pengumpulan data, sumber sekunder juga dapat berguna. Sumber sekunder mungkin dalam posisi lebih baik atau memiliki sumber daya yang lebih banyak untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dari sumber utama, yang nantinya dapat meningkatkan keandalan data. Sumber tersebut mencakup media, organisasi masyarakat sipil, organisasi internasional, pejabat dan badan pemerintahan, pengamatan dari lapangan serta putusan pengadilan atau quasi-yudisial.¹²⁵

Terakhir, sumber tersier, yang merupakan sumber yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kasus tertentu yang ada, namun dapat berfungsi sebagai rujukan untuk memahami konteks atau aspek lain yang kurang spesifik, seperti buku sejarah atau analisis negara.¹²⁶

Studi Kasus:

Untuk menyusun laporan tentang situasi PHAM yang dikriminalisasi, LNHAM Kenya mengadakan pertemuan individu dan kelompok bersama PHAM dan jaringannya, serta bersama polisi yang berinteraksi secara langsung dengan PHAM yang dipenjarakan. PHAM yang tidak dapat diwawancarai diberikan kuesioner. LNHAM juga berbicara dengan hakim dan pelaku negara, serta meninjau publikasi dan laporan dari berbagai sumber untuk menyusun sumber informasi utama dari lapangan.¹²⁷

Demikian pula, saat menyusun laporan tentang situasi PHAM, LNHAM Afrika Selatan mengadakan wawancara bersama aktivitas, peneliti, tokoh akademik, dan pengacara yang bekerja sama dengan PHAM untuk menyediakan konteks tentang pengalaman PHAM. LNHAM juga mengambil referensi dari laporan negara dan laporan yang diserahkan ke badan internasional dan regional, laporan dan dokumen yang tersedia dari departemen pemerintah, laporan dan riset yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil (OMS), jaringan dan kampanye; serta laporan media.¹²⁸

iii. Menganalisis data

Begitu data dikumpulkan, data tersebut harus dianalisis. Hal ini antara lain mencakup, menentukan keberadaan risiko. Yaitu, kemungkinan objektif bahwa sejumlah bahaya yang dihadapi PHAM akan terjadi.¹²⁹

Setelah semua informasi dianalisis, kesimpulan dapat diambil terkait situasi PHAM secara umum atau situasi PHAM secara khusus. Jika memungkinkan, hasil penilaian risiko dapat dibagikan kepada pihak berwenang terkait, untuk memberitahu mereka tentang analisis situasi risiko sehingga langkah perlindungan yang memadai (individu atau kolektif) dapat diambil (seperti yang dibahas dalam *Aksi Nasional 4*). Atau, kesimpulan dari informasi yang dikumpulkan dapat digunakan untuk menyusun laporan tentang situasi PHAM (seperti yang dibahas dalam *Aksi Nasional 6*).

123 https://ganhri.org/wp-content/uploads/2019/10/DIMR_GANHRI-CSW-Report_final-BF.pdf hal. 23

124 <https://ganhri.org/wp-content/uploads/2019/12/GANHRI-UNICEF-Children%E2%80%99s-Rights-in-National-Human-Rights-Institutions.pdf> hal. 33

125 http://www.civicus.org/images/stories/csw/EWS_Toolkit-March2010.pdf hal. 4

126 https://www.oas.org/es/sap/pubs/GuiaAlerta_s.pdf hal. 36, 37

127 https://www.knchr.org/Portals/0/CivilAndPoliticalReports/Defending%20the%20Defender_Human%20rights%20defenders%20in%20conflict%20with%20the%20law.pdf?ver=2018-06-06-175208-833 hal. 14

128 <https://www.sahrc.org.za/home/21/files/Human%20Rights%20Defenders%20Publication.pdf> page. halaman. 10

129 <https://www.protectioninternational.org/wp-content/uploads/2013/04/Best-Practices-and-Lessons-Learnt.pdf> hal. 89



AKSI NASIONAL 6:

Melaporkan pelanggaran terhadap
Pembela Hak Asasi Manusia

Dalam konteks RAR, pelaporan mencakup laporan publik tentang insiden khusus, serta pelanggaran yang dilakukan dalam skala yang lebih besar.¹³⁰ Elemen yang dimuat dalam tiap jenis laporan dijelaskan di bawah ini.

A. Melakukan penyelidikan nasional atau sesuai konteks terkait pelanggaran terhadap PHAM

Penyelidikan nasional atau sesuai konteks terkait pelanggaran terhadap PHAM membantu dalam meningkatkan pemahaman LNHAM Anda terhadap situasi PHAM di tingkat nasional serta pelanggaran yang mereka hadapi.

Penyelidikan nasional atau sesuai konteks juga berguna saat PHAM dalam konteks tertentu mengalami pelanggaran, misalnya PHAM transgender atau hak atas tanah yang terdampak secara tidak proporsional. Penyelidikan sesuai konteks juga dapat dilakukan saat iklim politik mendukung, misalnya saat undang-undang yang mengekang disebut-sebut.

Sarana untuk melakukan penyelidikan pada dasarnya sama seperti yang dijelaskan dalam *Aksi Nasional 5* tentang memantau pelanggaran. Seperti yang digambarkan dalam contoh RAR dan Aksi Nasional yang disebutkan sebelumnya, dengar pendapat dapat menjadi metode yang berguna,¹³¹ seperti yang dilakukan oleh Commission on Human Rights (CHR) Filipina dalam mengembangkan penyelidikan nasional tentang situasi pembela hak asasi manusia pada tahun 2019.¹³²

B. Menyusun laporan khusus tentang situasi pelanggaran terhadap pembela HAM

i. Pelaporan nasional

Melaporkan pelanggaran yang dialami oleh PHAM sangat penting dilakukan. Laporan dapat menjadi dasar kampanye untuk perlindungan PHAM, pernyataan publik atau siaran pers yang mengecam serangan,¹³³ aduan, atau litigasi strategis di hadapan badan-badan HAM regional atau internasional, atau bahkan postingan atau acara-acara di media sosial.

Laporan ini harus menyertakan rekomendasi untuk pihak Negara yang berwenang, atau badan PBB atau pemangku kepentingan lainnya seperti dunia usaha, tentang cara meningkatkan perlindungan terhadap PHAM.¹³⁴

Laporan ini dan tindakan lainnya yang menjadi dasarnya, termasuk advokasi publik yang menyoroti isu-isu yang mungkin tidak diperhatikan, mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dengan menarik perhatian publik kepada risiko tersebut, serta memberi tekanan publik pada mereka yang bertanggung jawab.¹³⁵

Studi Kasus:

Sejumlah LSM memberikan contoh yang bermanfaat: Pusat Pembela dan Keadilan Venezuela (*Centro para los defensores y la justicia*) mempublikasikan laporan bulanan, triwulanan, setengah tahun, dan tahunan tentang serangan yang dialami oleh PHAM di negara tersebut. Datanya dipilah menurut tanggal, jenis serangan, korban, dan pelaku.¹³⁶ Front Line Defenders juga mengumpulkan dan melaporkan pembela HAM yang terancam bahaya di seluruh dunia.¹³⁷ Laporan dari kedua LSM tersebut memang mencantumkan nama sejumlah korban, kemungkinan korban memang setuju jika identitasnya dibuka atau yang informasinya sudah tersebar ke publik.

¹³⁰ RAR halaman 29

¹³¹ RAR halaman 29

¹³² <https://chr.gov.ph/statement-of-chr-commissioner-roberto-eugenio-t-cadiz-on-the-launching-by-the-commission-on-human-rights-of-a-national-inquiry-on-the-situation-of-human-rights-defenders-in-the-country-today/>

¹³³ <https://www.frontlinedefenders.org/en/statement-report/international-and-local-ngos-condemn-32-year-prison-sentence-germain-rukuki-upheld>

¹³⁴ <https://undocs.org/en/A/HRC/22/47> ayat 87

¹³⁵ <https://undocs.org/en/A/HRC/22/47> ayat 98; <https://undocs.org/A/HRC/31/55> ayat 94

¹³⁶ <https://centrodefensores.org.ve/?p=281>

¹³⁷ <https://www.frontlinedefenders.org/open-cases>

LNHAM Kenya menyediakan contoh yang tepat tentang cara menggunakan sistem penanganan aduan dalam menyusun laporan. Karena aduan dapat disampaikan secara elektronik, maka di dalamnya terdapat sistem basis data di mana informasi dari pemohon dapat diserahkan (nama, nomor identitas, telepon, alamat pos, jenis kelamin, kewarganegaraan, usia, pendidikan, pekerjaan, kecamatan dan kelurahan). Setelahnya informasinya diisi, nomor akun ditetapkan ke aduan tersebut. Sistem basis data lalu dapat membuat laporan dan mengategorikannya ke dalam hak atau hak kelompok sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.¹³⁸

ii. Melaporkan sebagai bentuk partisipasi

Laporan juga dapat digunakan sebagai bentuk partisipasi dengan sistem hak asasi manusia internasional dalam rangka mengembangkan standar tentang perlindungan PHAM.¹³⁹ Ada banyak cara untuk melakukannya (dibahas secara detail dalam *Aksi Nasional 7*), diantaranya:¹⁴⁰

- Berkontribusi terhadap Universal Periodic Review (UPR) atau Peninjauan Berkala Universal di negara Anda.
- Berkontribusi secara independen terhadap proses pelaporan berdasarkan traktat HAM atau menyerahkan laporan alternatif dan “bayangan”.
- Menindaklanjuti rekomendasi yang dibuat oleh mekanisme HAM regional dan internasional.

Dalam kasus tertentu, LNHAM diundang untuk berpartisipasi dalam penyusunan laporan oleh pemerintah yang disajikan kepada badan HAM PBB. Seperti yang dialami oleh LNHAM Benin.¹⁴¹

C. Menyertakan bab PHAM dalam laporan tahunan LNHAM

Laporan merupakan cara penting untuk meningkatkan kesadaran tentang situasi PHAM dan tantangan yang mereka hadapi dalam pekerjaannya.¹⁴² Dengan cara ini, menyertakan bab tentang situasi PHAM dalam laporan tahunan Anda merupakan cara yang simpel dan efektif untuk memastikan pelaporan dan partisipasi yang berkelanjutan. Bab tersebut diantaranya dapat menunjukkan dinamika dan karakteristik ancaman yang dihadapi oleh PHAM, kekuatan dan kerentanan PHAM, mekanisme kelembagaan yang tersedia untuk melindungi mereka serta jumlah peringatan yang diaktifkan/dinonaktifkan. Ini juga harus mencakup rekomendasi bagi pemangku kepentingan terkait, khususnya pemerintah. Hal ini membutuhkan pengumpulan dan analisis data (baca *Aksi Nasional 5*).

Studi Kasus:

Kementerian Kehakiman dan HAM Peru memiliki divisi untuk PHAM, yang ditugaskan untuk mempublikasikan laporan tahunan tentang situasi PHAM. Tujuan dari laporan ini adalah menyoroti situasi risiko dan pola serangan yang dihadapi oleh PHAM di tingkat lokal, regional, dan nasional, dengan penekanan pada PHAM dari kelompok yang rentan.¹⁴³

138 <https://ganhri.org/wp-content/uploads/2019/10/English-Mapping-Survey-on-Complaints-Haldling-Systems-Final.pdf> hal. 25

139 https://ganhri.org/wp-content/uploads/2019/10/DIMR_GANHRI-CSW-Report_final-BF.pdf hal. 14

140 <https://ganhri.org/wp-content/uploads/2019/12/GANHRI-UNICEF-Children%E2%80%99s-Rights-in-National-Human-Rights-Institutions.pdf> hal. 34

141 <https://ganhri.org/wp-content/uploads/2019/10/English-Mapping-Survey-on-Complaints-Haldling-Systems-Final.pdf> hal. 17

142 <https://undocs.org/en/A/HRC/22/47> ayat 101

143 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/310740/RM_159_2019_JUS.pdf pasal 6.2.2



AKSI NASIONAL 7:

Terlibat dalam sistem HAM internasional

A. Melaporkan pelanggaran kepada badan HAM internasional

Aksi Nasional 6 mencakup pelaporan pelanggaran terhadap PHAM. Bagian ini akan membahas partisipasi dengan badan dan mekanisme HAM internasional, salah satu ruang penting untuk menyerahkan laporan tersebut.

Mekanisme ini menyediakan ruang untuk meningkatkan pengawasan dan memberi lebih banyak tekanan kepada pemerintah untuk mendukung dan menghormati HAM. Partisipasi dengan badan dan mekanisme internasional bahkan lebih penting dalam situasi jika pemerintah tidak efisien dalam menangani situasi HAM, atau terlibat dalam pelanggaran tersebut.

PBB memiliki sejumlah mekanisme untuk mendukung dan melindungi hak asasi manusia, dan masing-masing bekerja dengan caranya sendiri:

- Dewan HAM/ Human Rights Council (HRC)
- Prosedur Khusus Dewan HAM
- Peninjauan Berkala Universal/ Universal Periodic Review (UPR)
- Badan Traktat

ISHR dan APF memiliki sejumlah sumber daya yang bermanfaat tentang cara terlibat dalam mekanisme ini.¹⁴⁴

Anda dapat menyerahkan laporan ke salah satu atau semua mekanisme ini, dan masing-masing dari mekanisme ini menghasilkan rekomendasi, hasil, atau aksi yang berasal dari masukan laporan tersebut. Begitu laporan diserahkan ke salah satu badan atau mekanisme ini, Anda harus menindaklanjuti laporan tersebut, khususnya rekomendasi, hasil, atau aksi yang dihasilkan dari laporan tersebut.

Anda diundang untuk menyerahkan laporan tentang situasi HAM di negara Anda, mengikuti prosedur dalam UPR dan Badan Traktat. Laporan ke UPR dapat mencakup semua HAM di dalam negeri, sedangkan laporan ke badan traktat harus sesuai dengan traktat yang dipantau oleh badan traktat. Saat menyerahkan laporan tersebut, idealnya harus ada bagian terpisah terkait pelanggaran terhadap PHAM.

Studi Kasus:

Pada tahun 2020, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM) menyerahkan Laporan Daftar Masalah Sebelum Pelaporan/ List of Issues Prior to Reporting (LOIPR) tentang Laporan Berkala Kedua Indonesia Antisipasi terhadap Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR). Laporan tersebut menyebutkan bahwa “*Sejumlah catatan negatif terdapat dalam implementasi ICCPR yang antara lain mencakup (sic), meningkatnya ujaran kebencian, kriminalisasi kritik politik, ancaman untuk pembela HAM [...]*”¹⁴⁵

Untuk Siklus Ketiga Peninjauan Berkala Universal Bangladesh, Komisi HAM Nasional/ National Human Rights Commission (NHRCB) Bangladesh menyerahkan laporan yang antara lain, merekomendasikan agar Negara: “*Memastikan lingkungan yang kondusif untuk membangun budaya HAM dan memberikan kesempatan dan platform yang lebih besar bagi aktivis HAM, pembela HAM, LSM, OMS, jurnalis, yang memungkinkan partisipasi konstruktif untuk mendukung dan menyebarkan HAM.*”¹⁴⁶

B. Memantau implementasi rekomendasi dari badan internasional

Rekomendasi yang dibuat oleh badan atau mekanisme HAM harus diterapkan oleh Negara. LNHAM Anda akan berperan penting dalam memantau implementasi rekomendasi, perjanjian, atau komitmen tersebut.

144 Baca: <https://www.asiapacificforum.net/resources/manual-on-international-human-rights-system/>; baca juga

‘Navigating the UN’ [Menelusuri PBB] oleh ISHRGlobal. 13 Maret 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=6lZplzFqSuw>

145 https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/IDN/INT_CCPR_IFR_IDN_42303_E.pdf ayat 5

146 <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRBangladeshStakeholdersInfoS30.aspx> hal. 10

i. Cara menindaklanjuti rekomendasi

a) Media

Salah satu cara untuk menindaklanjutinya adalah dengan menyebarluaskan dan mendapatkan liputan berita tentang langkah yang diambil oleh suatu badan atau mekanisme. Ini dapat membantu menarik perhatian pada masalah di negara Anda dan menekan pemerintah untuk meresponsnya dengan cara tertentu, termasuk dengan mengimplementasikan rekomendasi.

Misalnya:

- Anda dapat mengadakan jumpa pers dan wawancara, menjadi pembicara sebagai pakar HAM di radio dan televisi, dan menyampaikan rekomendasi di media.
- Anda dapat menyebarkan pengamatan akhir kepada masyarakat sipil, pengadilan dan anggota pemerintah daerah, serta menerjemahkannya ke bahasa nasional, dan/atau membuat pengamatan akhir dalam versi singkat dan sederhana dalam format yang mudah diakses dan nyaman untuk dibaca.
- Anda bisa mendapatkan publisitas untuk masalah tersebut melalui artikel singkat di surat kabar atau forum publik lainnya yang dapat menarik perhatian publik ke rekomendasi tersebut.
- Anda dapat menulis artikel, siaran pers, acara atau postingan media sosial, untuk menandai enam bulan sejak laporan dikirimkan dan menyoroti apa yang telah atau gagal dilakukan oleh pemerintah.
- Anda dapat mengadakan pemutaran publik untuk dialog yang diadakan antara badan atau mekanisme dengan perwakilan Pemerintah Anda, dengan tujuan untuk mendorong debat dan pengawasan umum atas tindak lanjut pemerintah Anda.

b) Memantau implementasi

Anda dapat memantau upaya pemerintah dalam mengimplementasikan pengamatan dan rekomendasi dari badan atau mekanisme, dan melaporkan kembali informasi ini ke badan atau mekanisme baik melalui pengajuan formal atau informal. Ini misalnya dapat dilakukan dengan membuat laporan tindak lanjut atau laporan tengah tahun untuk proses peninjauannya sebagai sarana untuk membantu badan atau mekanisme dalam menilai jenjang pengimplementasian rekomendasi oleh Negara.

c) Pertemuan dengan pemerintah

Anda juga dapat mendesak pemerintah Anda untuk mengimplementasikan rekomendasi. Ini dapat mencakup mengadakan pertemuan atau konferensi bersama pejabat pemerintah dan LSM, anggota rapat parlemen secara individu, atau komite terkait dalam parlemen (mis. tentang HAM atau bidang luar negeri) dan membahas rekomendasi tersebut dengan delegasi Negara. Anggota parlemen secara khusus memiliki peran penting dalam pengimplementasian traktat HAM dan rekomendasi dari Badan Traktat.

Selama diskusi, Anda harus menekankan rekomendasi yang telah diprioritaskan tersebut dan secara spesifik diidentifikasi untuk ditindaklanjuti dalam enam bulan atau setahun. Batas waktu yang lebih singkat ditambah dengan penentuan prioritas untuk rekomendasi khusus tersebut dapat membantu memberi tekanan tambahan kepada Negara untuk mengimplementasikannya, dan juga membantu Negara untuk mengidentifikasi target jangka panjang serta jangka pendek.

Terakhir, Anda dapat bekerja sama dengan pemerintah Anda untuk mengimplementasikan rekomendasi, serta mendorong reformasi legislatif atau kebijakan. Anda juga dapat menggunakan pengamatan akhir dan rekomendasi untuk memandu tugas Anda sendiri di tingkat regional, nasional, atau lokal.

d) Pengadopsian rencana implementasi

Sejumlah negara telah mengadopsi rencana implementasi nasional untuk rekomendasi HAM internasional, termasuk dari Badan Traktat, Prosedur Khusus, dan UPR, seringkali dengan dukungan dunia internasional (khususnya dari OHCHR). Rekomendasi dari mekanisme HAM regional juga dapat disertakan dalam rencana tersebut.

Misalnya, Komite Menentang Penyiksaan mengadopsi *kebijakan tindak lanjut* di mana Negara diminta untuk mengadopsi rencana implementasi berdasarkan rekomendasi dari Komite. Rencana tersebut dapat berkontribusi terhadap koordinasi yang signifikan antara pemangku kepentingan terkait dan progress menuju kepatuhan dan implementasi rekomendasi di tingkat nasional. LSM Internasional, komunitas diplomatik, dan badan-badan PBB, terutama OHCHR dan UNDP, seringkali dapat membantu pengembangan dan pelaksanaan rencana tersebut.

e) Partisipasi dengan LSM

LSM merupakan sekutu yang penting dalam proses tindak lanjut di tingkat nasional. Anda dapat dan harus (*sebagai persyaratan dari Prinsip-Prinsip Paris*)¹⁴⁷ berkoordinasi dan bekerja sama dengan LSM terkait strategi dan taktik untuk menindaklanjuti pandangan dan rekomendasi. Di banyak negara, LNHAM dapat bekerja sama dengan LSM terkait penyusunan tinjauan negara.

Studi Kasus:

Pacific Commonwealth Equality Project mendukung pembentukan dan pemenuhan fungsi NMRF di wilayah Pasifik, dan partisipasi berbagai aktor dalam penyusunan dan tindak lanjut tinjauan Badan Traktat dan UPR.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara terlibat dengan Badan Traktat, baca *Lampiran I*.

Selain terlibat dengan LSM selama proses tindak lanjut, Anda mungkin ingin melibatkan berbagai aktor lainnya yang relevan, misalnya komite di parlemen, serikat dagang, dan badan-badan PBB. Anda mungkin ingin memulai dengan pemetaan aktor yang komprehensif yang akan terkait dengan implementasi rekomendasi.

Untuk efisiensi, Anda mungkin ingin mengonsolidasikan upaya tindak lanjut Anda dengan mengumpulkan rekomendasi dari berbagai mekanisme HAM. Ada banyak contoh proses tindak lanjut di tingkat nasional yang tidak hanya meninjau rekomendasi dari Badan Traktat, namun juga rekomendasi dari proses UPR, serta rekomendasi dari Prosedur Khusus, serta mekanisme HAM regional.

f) Pertemuan

Anda dapat meminta untuk mengadakan pertemuan (atau diskusi) dengan anggota badan atau mekanisme untuk terus mengetahui informasi terbaru tentang bagaimana keputusan/pandangan/rekomendasi mereka telah diimplementasikan. Selain itu, menjaga komunikasi dan memelihara hubungan dengan anggota yang relevan sangat bermanfaat untuk pemantauan dan jika Anda ingin terlibat lebih jauh.

C. Prosedur Khusus

Prosedur khusus merupakan pakar HAM independen yang ditugaskan oleh PBB untuk menyelidiki dan melaporkan situasi HAM di seluruh dunia. Terhitung November 2021, terdapat 45 *mandat tematik*¹⁴⁸ dan 13 *mandat negara*.¹⁴⁹

i. Elemen utama

Beberapa elemen utama dari Prosedur Khusus adalah:

¹⁴⁷ <https://www.asiapacificforum.net/support/what-are-nhris/fact-sheet-9-cooperation/>

¹⁴⁸ <https://spinternet.ohchr.org/ViewAllCountryMandates.aspx?Type=TM>

¹⁴⁹ <https://spinternet.ohchr.org/ViewAllCountryMandates.aspx>

Urgensi: Prosedur Khusus dapat merespons situasi yang mendesak dengan cepat. Prosedur Khusus merupakan satu-satunya mekanisme HAM PBB yang dapat mengeluarkan permohonan mendesak. Fungsi ini sangat penting dalam kasus pelanggaran yang sedang terjadi atau dalam mencegah pelanggaran yang akan terjadi, dan telah menyelamatkan banyak nyawa di masa lalu.

Advokasi dan Peningkatan Kesadaran: Semua tugas Prosedur Khusus dapat dianggap sebagai advokasi atau upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah HAM tertentu. Ini mungkin tidak terlihat sama dengan advokasi akar rumput, akan tetapi Prosedur Khusus dapat melakukan banyak hal: membuat rekomendasi, membuat pernyataan dalam acara-acara, mengeluarkan siaran pers, dan mengadakan pertemuan dengan Negara dan aktor lainnya secara tertutup untuk mencoba dan mengubah cara pemerintah dan pihak lainnya dalam bertindak.

Aksesibilitas: Prosedur Khusus dapat dihubungi dengan mudah. Korban atau kelompok manapun dapat menggunakan mekanisme ini.

Jangkauan: Prosedur Khusus dapat beroperasi secara independen dari ratifikasi traktat oleh Negara. Artinya, pekerjaan mereka bersifat universal sehingga mereka dapat meninjau dan merespons pelanggaran terhadap hak-hak di negara mana pun di dunia dalam lingkup mandat mereka. Misalnya, Pelapor Khusus tentang perumahan, kemiskinan ekstrem, dan kesehatan dapat meninjau masalah HAM di Amerika Serikat, meskipun Pelapor Khusus tidak meratifikasi Kovenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Tidak perlu menempuh proses hukum di lingkup nasional: Sejumlah mekanisme HAM internasional mensyaratkan korban untuk telah menempuh semua jalur kompensasi di lingkup nasional (mis. pengadilan) sebelum mereka akan bertindak. Ini tidak berlaku untuk Prosedur Khusus. Anda dapat langsung menghubungi mereka kapan pun.

Independensi: Karakteristik penting dari Prosedur Khusus adalah independensinya dari pemerintah begitu ditunjuk. Hal ini memungkinkan mereka untuk menangani masalah yang sensitif dari segi politik serta menantang pemerintah dengan cara yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh badan-badan lain. Mereka juga dapat mengusulkan dan mendukung interpretasi progresif dari undang-undang internasional yang memperkuat HAM, dan untuk terus membawa masalah tertentu ke agenda internasional sepanjang waktu jika Negara secara aktif bermusuhan atau takut saat menghadapi permusuhan dari lawannya.

ii. Hasil dari Prosedur Khusus

a) Komunikasi

Komunikasi merupakan surat yang dikirim oleh Prosedur Khusus kepada pemerintah untuk menindaklanjuti informasi yang telah mereka terima tentang tuduhan pelanggaran terhadap hak-hak yang tercakup dalam mandat mereka. Komunikasi berupaya untuk mengakhiri pelanggaran tersebut, dan untuk mendapatkan kompensasi bagi korban. Dalam beberapa tahun belakangan ini, sejumlah Prosedur Khusus telah mulai mengirimkan komunikasi ke badan non-Negara, seperti perusahaan dan aktor antar-pemerintah seperti Dewan HAM.

Terdapat tiga jenis komunikasi utama yang ada di Prosedur Khusus:

- **Permohonan mendesak:** Ini merupakan sarana darurat untuk menghentikan pelanggaran yang sedang terjadi atau mencegah potensi pelanggaran yang mungkin akan terjadi. Prosedur Khusus bertujuan untuk mengirimkan permohonan tersebut secepatnya setelah menerima informasinya. Permohonan mendesak meminta klarifikasi tentang status individu atau kelompok, serta mengingatkan pemerintah tentang tanggung jawabnya terhadap orang-orang tersebut.
- **Surat tuduhan:** Sebaliknya, hal ini berkaitan dengan situasi HAM yang telah terjadi. Surat ini menguraikan tuduhan yang relevan lalu meminta informasi dari pemerintah tentang tuduhan ini, serta tindakan apapun yang diambil untuk memberikan kompensasi kepada korban. Surat ini dapat memberi saran terkait langkah yang harus diambil oleh pemerintah untuk menindaklanjuti insiden yang dijelaskan. Surat ini dapat menangani kasus yang melibatkan pelanggaran terhadap individu atau kelompok dan juga dapat menangani masalah yang lebih umum tentang situasi HAM di suatu negara.
- **Komunikasi kebijakan/legislatif:** Ini merupakan bentuk komunikasi yang relatif baru dan dikirimkan untuk menyampaikan keprihatinan karena kebijakan atau penggalan undang-undang yang ada atau diusulkan memiliki dampak atau akan berdampak pada penggunaan hak oleh anggota penduduk tertentu. Tidak seperti bentuk komunikasi lainnya, sejumlah komunikasi ini langsung disampaikan secara terbuka melalui situs web Prosedur Khusus terkait.

Komunikasi biasanya didasarkan pada informasi yang dikirim ke Prosedur Khusus oleh LSM atau korban. Semua jenis komunikasi dapat dikirim oleh Prosedur Khusus individu atau bersama-sama dengan lainnya jika pelanggaran termasuk dalam beberapa kategori. Misalnya, dugaan seorang PHAM yang ditahan semena-mena karena mengadakan unjuk rasa dapat berujung pada komunikasi yang dikirim bersama oleh Prosedur Khusus yang menangani PHAM, terkait penahanan semena-mena, dan terkait kebebasan berkumpul. Komunikasi Prosedur Khusus, dan respons pemerintah, disediakan dalam *basis data di situs web OHCHR* dan dalam *laporan yang disajikan ke HRC atau Dewan HAM*.

b) Pernyataan dan siaran pers

- **Pernyataan:** Pernyataan sering kali dibuat saat pakar berbicara di acara tertentu atau saat mereka ingin menandai tanggal tertentu. Prosedur Khusus secara rutin membuat pernyataan publik seperti itu bersama mekanisme PBB atau regional lainnya, untuk menunjukkan posisi bersama dalam masalah tertentu.
- **Siaran pers:** Ini biasanya dikeluarkan sebagai tanggapan terhadap situasi yang menurut pakar cukup mendesak atau parah untuk menjamin respons publik. Siaran pers tentang kasus tertentu tidak dapat dilakukan hingga komunikasi telah dikirim terlebih dahulu ke Negara terkait. Siaran pers – seperti komunikasi lainnya – akan sering dikeluarkan bersama-sama oleh sejumlah pakar. Pemegang mandat Prosedur Khusus juga biasanya mengeluarkan siaran pers pada awal kunjungan ke negara, lalu mengadakan jumpa pers pada akhir kunjungan. Prosedur Khusus makin sering menggunakan acara ini sebagai peluang untuk menyampaikan kesimpulan awal dan rekomendasi berdasarkan hasil pengamatan mereka. Siaran pers tentang Prosedur Khusus disediakan dalam basis data di *situs web OHCHR*.

c) Kunjungan ke negara

Salah satu cara utama bagi Prosedur Khusus untuk mencari tahu situasi di negara-negara tertentu adalah melalui kunjungan ke negara. Selama kunjungan tersebut, para pakar berupaya untuk memahami perwujudan hak-hak yang tercakup dalam mandat mereka, serta situasi HAM yang lebih umum, melalui pertemuan dengan perwakilan pemerintah, korban, dan anggota masyarakat sipil, serta mengunjungi tempat-tempat yang terkait dengan mandat mereka.

Kunjungan ini bisa bersifat ‘resmi’ atau ‘formal’ (atas undangan pemerintah) atau ‘tidak resmi’ atau ‘informal’ (seringkali terkait dengan konferensi atau acara yang diselenggarakan oleh LSM atau universitas).

- **Kunjungan resmi:** Pada akhir kunjungan resmi, para pakar membuat rekomendasi dan menyampaikan laporan ke HRC atau Dewan HAM. Jumlah kunjungan resmi yang dilakukan oleh tiap pakar atau kelompok pakar adalah 2-3 kali dalam tahun yang ditetapkan. Informasi tentang negara dan kunjungan lainnya dari Prosedur Khusus disediakan dalam basis data di *situs web OHCHR*.
- **Kunjungan informal:** Kunjungan ini tidak menghasilkan laporan atau daftar rekomendasi dan biayanya tidak ditanggung oleh OHCHR, akan tetapi kunjungan tersebut menyediakan peluang lain karena tidak ada batas jumlah kunjungan yang dapat dilakukan oleh pakar dalam setahun.
- **Misi Mendesak:** Dalam situasi luar biasa, Prosedur Khusus dapat dimandatkan oleh HRC (Dewan HAM) untuk menjalankan misi mendesak, baik secara individu atau sebagai bagian dari kelompok, untuk menilai situasi HAM darurat serta untuk memberi informasi terbaru kepada HRC.

Anda dapat membantu mengkoordinasikan kunjungan ke negara dan memberi dukungan untuk mewujudkannya secara efektif, misalnya dengan memberitahu Prosedur Khusus tentang pemangku kepentingan yang menjadi perhatian atau mengkhawatirkan.

d) Laporan tematik

Semua Prosedur Khusus menyerahkan laporan tertulis tahunan kepada Dewan HAM, yang disediakan di halaman *web Dewan HAM OHCHR* dalam hitungan minggu menjelang sesi di mana laporan tersebut akan dipresentasikan. Laporan ini juga tersedia di situs web pemegang mandat terkait.

Laporan tersebut biasanya mencakup ringkasan pekerjaan tahun ini serta membahas masalah tematik atau normatif yang timbul. Laporan tersebut juga berisi rekomendasi untuk Negara dan aktor lainnya yang terkait, seperti badan PBB, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Laporan ini dapat meminta negara untuk mengonfirmasi situasi HAM, serta desakan kepada Negara untuk mengatasi suatu situasi secara aktif.

Laporan tematik resmi ini merupakan salah satu cara Prosedur Khusus dalam menunjukkan perannya dalam pengembangan HAM normatif. Selama sesi Dewan HAM, para pakar menyampaikan presentasi lisan tentang laporan mereka kepada HRC (Dewan HAM) dan terlibat dalam dialog interaktif dengan Negara dan pemangku kepentingan lainnya, misalnya LSM. Selama dialog ini, pertanyaan dapat ditujukan ke para pakar tentang pekerjaan mereka saat ini dan yang akan datang, serta tentang pengembangan normatif dari hak-hak yang mereka cakup.

Prosedur Khusus terkadang diminta oleh Dewan HAM untuk memberi informasi terbaru tentang situasi yang menjadi perhatian khusus atau laporan tentang masalah tertentu. Terkadang Dewan HAM akan, melalui resolusi, memberi mandat kepada Prosedur Khusus untuk memberi laporan kepada Majelis Umum. Saat memberi laporan ke Majelis Umum, pemegang mandat terlibat dalam dialog interaktif hanya dengan Negara, meskipun LSM dapat berupaya memengaruhi pernyataan dan pertanyaan yang disampaikan oleh Negara. Dalam penyusunan laporan tahunan tersebut, UNSR juga menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk LNHAM.¹⁵⁰

Studi Kasus:

Pada tanggal 24 Desember 2020, Pelapor Khusus di pangkalan PHAM menerima laporan tentang pembunuhan PHAM di seluruh dunia. Dalam penyusunan laporan tersebut, mandat menerima masukan dari LNHAM berikut: Burundi (BHNHRC), Ekuador (DPE), Mesir (NHRC), Georgia (Ombudsman of Georgia), India (NHRC), Maladewa (HRC), Kota Meksiko (CDHCM), Slowakia (NHRC), dan Togo (CNDH). Masukan tersebut datang dalam bentuk jawaban atas kuesioner yang dikirim oleh UNSR, dan dapat diunduh di situs web laporan tersebut.¹⁵¹

Untuk informasi selengkapnya tentang cara untuk terlibat dengan prosedur khusus, baca *Lampiran I*.

D. Pelapor Khusus tentang situasi pembela HAM

Pelapor Khusus PBB untuk situasi PHAM merupakan sekutu penting dalam upaya untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak PHAM. Pelapor Khusus ini memiliki mandat untuk memajukan pekerjaan PHAM dan melindungi pembela HAM yang terancam bahaya. Mereka melakukannya dalam konteks Deklarasi PBB untuk PHAM yang diadopsi berdasarkan konsensus pada tahun 1998. Sebagai pemegang mandat prosedur khusus, mereka bertugas sebagai relawan dan independen dari PBB, Negara, dan LSM.¹⁵² Mereka memiliki *halaman web di situs web OHCHR*, serta *halaman web independen*.

Sebagai bagian dari tugas mereka, mandat:

- **Menulis surat resmi** kepada pemerintah dan aktor lainnya (seperti perusahaan) yang disebut “komunikasi”. Dalam surat-surat ini, mereka menyampaikan keprihatinan tentang situasi di mana para pembela HAM terancam bahaya.¹⁵³
- **Melibatkan otoritas Negara** dalam dialog tentang situasi PHAM di negara mereka melalui pertemuan terbuka dan tertutup, webinar, dan acara lainnya.

150 <https://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/longterm-detention-defenders.aspx>

151 <https://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/CFI-killings-human-rights-defenders.aspx>

152 <https://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/MaryLawlor.aspx>

153 Anda dapat menemukan surat-surat ini di sini: <https://srdefenders.org/news/> <https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments>

- Melakukan **dua kunjungan resmi tahunan** ke negara-negara setelah mendapatkan undangan dari Pemerintah. Mereka lalu menuliskan laporan tentang situasi PHAM di tempat-tempat tersebut, termasuk rekomendasi kepada Pemerintah dan aktor lainnya tentang cara untuk mendukung dan melindungi mereka dengan lebih baik.¹⁵⁴
- Menulis **laporan tematik** yang dipresentasikan kepada Negara-negara di Dewan HAM PBB dan Sidang Majelis Umum PBB setiap tahunnya. Secara umum, Pelapor Khusus mengundang PHAM dan masyarakat sipil untuk menginformasikan laporan-laporan ini dengan menyerahkan informasi secara resmi.
- **Mempromosikan pekerjaan PHAM** di media sosial dan situs web mereka.¹⁵⁵
- **Mengadakan** dan terlibat dalam **konsultasi** bersama PHAM, baik secara daring maupun luring.
- **Berpartisipasi** dalam **acara** dan **webinar** bersama PHAM, baik secara daring maupun luring, termasuk *yang disiapkan oleh APF*.

E. Memperkuat kapasitas anggota dalam partisipasi

Peningkatan kapasitas dan program pelatihan tentang partisipasi dalam mekanisme dan badan PBB merupakan komponen utama dalam memastikan penguatan partisipasi dengan sistem-sistem tersebut. Mekanisme dan badan PBB bisa tampak membingungkan dan tak dapat ditembus dari luar.

Ada banyak juga organisasi yang bersedia dan mampu membantu dalam peningkatan kapasitas tersebut, yang mencakup LSM yang mendukung partisipasi oleh pemangku kepentingan dalam mekanisme tertentu, seperti Centre for Civil and Political Rights yang mendukung partisipasi dengan Komite HAM PBB, yang merupakan salah satu dari badan traktat.

APF berkomitmen untuk mendukung LNHAM Anda guna meningkatkan kapasitasnya untuk terlibat dengan badan dan *mekanisme PBB*, termasuk manual AFP yang berjudul '*International Human Rights dan International Human Rights System: Manual untuk LNHAM*.'



154 Baca laporan sebelumnya tentang kunjungan ke negara: <https://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/CountryVisits.aspx>

155 Anda dapat mengikuti UNSR tentang PHAM di Twitter di sini: <https://twitter.com/MaryLawlorhrds>



AKSI NASIONAL 8:

Memperkuat jaringan Pembela
HAM nasional

A. Mendukung pembentukan, pengadaan, penyuluhan, dan kemitraan jaringan PHAM

Lingkungan tugas PHAM sangat luas, sehingga untuk mengoptimalkan dampak dan secara efektif berbagi pengetahuan, sumber daya, dan keahlian yang didapatkan, maka pembentukan koalisi sangat vital dilakukan. LSM atau koalisi PHAM dapat dibentuk secara ad-hoc atau, permanen. Koalisi tersebut bisa bersifat lokal, nasional, regional, atau internasional. Juga dapat difokuskan pada tema tertentu.

Ada banyak jaringan PHAM yang sudah ada dan bersifat lokal, regional, dan internasional. Anda juga dapat berperan penting dalam mendukung jaringan tersebut. Cukup memfasilitasi percakapan di dalam dan antara jaringan ini sangat bermanfaat untuk kemajuan.

Seperti yang disebutkan pada bagian '*Perlindungan Kolektif*', Anda akan sangat efektif jika mendukung dimensi kolektif dari pekerjaan HAM, yang selalu mencakup jaringan PHAM. Anda dapat berperan penting dalam memperkuat dan mendukung jaringan PHAM, misalnya dengan cara:

- Memperkuat kemampuan mereka untuk menjangkau pemangku kepentingan lainnya guna membahas strategi dan bertukar informasi.
 - Anda dapat membantu jaringan baru untuk mengembangkan koneksi melalui dialog yang difasilitasi dan dengan pemangku kepentingan lainnya seperti perwakilan pemerintah, organisasi internasional, pakar dan badan PBB, serta mendukung mereka untuk melakukan penyuluhan yang penting.
 - Sebagai lembaga yang umumnya memiliki lebih banyak dana dan koneksi, Anda juga dapat mendorong dialog antara PHAM dan komunitas untuk belajar dari satu sama lain serta membahas strategi perlindungan.
- Memperkuat eksistensi organisasi dan kelembagaan mereka.
- Memberi mereka ruang, infrastruktur dan tenaga, serta sumber daya lainnya secara gratis dan aman untuk memastikan bahwa mereka dapat bertemu dan mengadakan pertemuan dengan aman. Seperti yang sering dilakukan oleh Komisi HAM Filipina (CHR)
- Memberikan dukungan dan program peningkatan kapasitas untuk PHAM, termasuk panduan tata kelola dan dukungan peningkatan kapasitas lainnya
- Melakukan aksi politik yang ditujukan untuk melegitimasi jaringan tersebut dan para anggotanya. Anda dapat memperkuat legitimasi jaringan PHAM dengan mendukung aksi dan kampanye mereka, khususnya dalam situasi jika Anda mendapatkan kepercayaan dari masyarakat atau pemangku kepentingan tertentu bahwa jaringan tersebut belum berkembang.

Pembentukan Jaringan PHAM dapat menghasilkan sejumlah dampak positif:

- Jaringan memberikan "kekuatan yang lebih besar" untuk PHAM;
- Memfasilitasi pemajuan perlindungan kolektif terhadap PHAM;
- Jaringan seperti itu meningkatkan dampak pekerjaan pembela HAM dengan memungkinkan pembela untuk menyatukan sumber daya dan kemampuannya, menghindari duplikasi pekerjaan, serta memiliki dampak politik yang lebih kuat;
- Jaringan dapat memanfaatkan instansi publik (termasuk LNHAM) untuk terhubung dengan aktor internasional, proses-proses kebijakan pemerintah, mekanisme PBB dan lainnya; dan
- Jaringan dapat memberikan dukungan kepada organisasi yang melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan PHAM, termasuk dengan memberikan data dan informasi secara langsung.

Studi Kasus:

LNHAM Filipina sering menyediakan ruangnya sebagai tempat bagi LSM dan PHAM untuk mengadakan pertemuan dan acara

LAMPIRAN I

Sumber daya lebih lanjut tentang cara untuk terlibat dengan sistem HAM internasional (*Aksi Nasional 7*):

- *Peran LNHAM dalam Proses-proses Badan Traktat PBB* (Lembaga Jerman untuk HAM).
- *Implementasi rekomendasi Komite Hak Asasi Manusia: Apa peran untuk Negara, LNHAM, dan masyarakat sipil? (2015) Laporan konsultasi regional - Afrika Timur dan Selatan* (Centre for Civil and Political Rights)

Informasi selengkapnya tentang cara untuk terlibat dengan prosedur khusus (*Aksi Nasional 7*):

- **Komunikasi:** Anda dapat mengirim informasi ke Prosedur Khusus agar mereka mengirim komunikasi kepada pemerintah Anda atau pemangku kepentingan lain yang terkait tentang masalah atau kasus tertentu.¹⁵⁶
- **Pernyataan dan siaran pers:** Anda dapat meyakinkan Prosedur Khusus untuk menyampaikan pernyataan publik untuk menandai suatu peristiwa atau menyoroti masalah atau kasus tertentu agar sesuai dengan kebutuhan advokasi Anda.¹⁵⁷
- **Kunjungan ke negara:** Anda dapat mencoba memastikan bahwa Prosedur Khusus berkunjung ke negara Anda dan memberi rekomendasi yang relevan dengan masalah yang Anda tangani.¹⁵⁸
- **Laporan tematik:** Anda dapat mendorong Prosedur Khusus untuk menggunakan laporan tematiknya untuk menyertakan atau fokus pada masalah yang Anda tangani, dan Anda dapat menggunakan laporan mereka dalam advokasi Anda.¹⁵⁹
- **Menindaklanjuti:** Anda dapat bekerja sama dengan Prosedur Khusus setelah mereka bertindak guna memastikan perhatian yang berkelanjutan terhadap suatu masalah dan mendorong adanya perubahan di lapangan

156 Untuk informasi selengkapnya, baca: ISHR Academy: Communications – Why are they useful [Komunikasi - Apa manfaatnya]? Di: <https://academy.ishr.ch/learn/special-procedures/communications-1>;

ISHR Academy: Requesting a communication in [Meminta komunikasi di]: <https://academy.ishr.ch/learn/special-procedures/requesting-a-communication>

PHAM UNSR: <https://srdefenders.org/the-mandate/the-mandate/the-communications/> <https://srdefenders.org/submit-information/submit-information-on-a-human-rights-violation/>

157 Untuk informasi selengkapnya, baca: ISHR Academy: Pernyataan dan siaran pers

<https://academy.ishr.ch/learn/special-procedures/statements-and-press-releases-1>

<https://academy.ishr.ch/learn/special-procedures/pushing-for-statements-and-press-releases>

158 Untuk informasi selengkapnya, baca: Sumber daya ISHR Academy tentang kunjungan ke negara.

<https://academy.ishr.ch/learn/special-procedures/obtaining-a-country-visit>

<https://academy.ishr.ch/learn/special-procedures/country-visits-1>

159 Untuk informasi selengkapnya, baca: Sumber daya ISHR tentang laporan tematik. <https://academy.ishr.ch/learn/special-procedures/thematic-reports-1>

<https://academy.ishr.ch/learn/special-procedures/influencing-thematic-reports>

Note

The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the APF concerning the legal status of any country, territory, city or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

Operational Guide for Regional Action Plan on Human Rights Defenders

© Copyright Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions January 2022

No reproduction is permitted without prior written consent from the APF.

Photos by Vijeshwar Datt on Unsplash; Commission on Human Rights of the Philippines; Srimathi Jayaprakash on Unsplash; Capturing the human heart on Unsplash; Sippakorn Yamkasikorn on Unsplash; APF/Faso Aishath; mhrezaa on Unsplash; and the APF. All other images from Shutterstock and istockphoto.



ASIA PACIFIC FORUM
ADVANCING HUMAN RIGHTS IN OUR REGION

Follow us on social media



Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions

GPO Box 5218, Sydney NSW 1042 Australia

E apf@asiapacificforum.net **W** www.asiapacificforum.net



**Funded by
the European Union**



**International Service
for Human Rights**